

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

***THE AUDIT BOARD OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA***

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
*INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

**ATAS
ON**

**LAPORAN KEUANGAN
*FINANCIAL STATEMENT***

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
*FOR THE YEARS ENDED***

**31 DESEMBER 2015 DAN 2014
*DECEMBER 31, 2015 AND 2014***

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

***THE AUDIT BOARD OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA***

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
*INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT***

**ATAS
*ON***

**LAPORAN KEUANGAN
*FINANCIAL STATEMENT***

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
*FOR THE YEARS ENDED***

**31 DESEMBER 2015 DAN 2014
*DECEMBER 31, 2015 AND 2014***

DAFTAR ISI / TABLE OF CONTENTS

	<u>Halaman / Page</u>	
Laporan Auditor Independen	1 - 2	<i>Independent Auditor's Report</i>
Neraca	1	<i>Balance Sheet</i>
Laporan Realisasi Anggaran	2	<i>Statement Of Budget Realization</i>
Laporan Operasional	3	<i>Statement Of Operation</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	4	<i>Statement Of Change in Equity</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	5 - 30	<i>Notes To The Financial Statements</i>

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**SURAT PERNYATAAN SEKRETARIS JENDERAL
THE SECRETARY-GENERAL STATEMENT**

**TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015**

**THE RESPONSIBILITY FOR
FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2015**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendar Ristriawan
Alamat kantor : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 31,
Jakarta Pusat 10210
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK)

The undersigned:

Name : Hendar Ristriawan
Office Address : Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 31,
Jakarta Pusat 10210
Job Title : Secretary General
of The Audit Board of
The Republic of Indonesia (BPK)

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPK tahun anggaran 2015 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Laporan Keuangan BPK telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan BPK telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan BPK tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Bertanggung jawab atas kepatuhan BPK terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern.

Declare that:

1. Responsible for the preparation and presentation of Financial Statement of BPK, budget year 2015 that consist of Balance Sheet, Statement of Budget Realization, Operation and Change in Equity and Notes to the Financial Statements.
2. Financial Statement of BPK have been prepared and presented in accordance with Government Accounting Standards in Indonesia.
3. a. All information have been fully and correctly disclosed in Financial Statements of BPK.
b. The Financial Statements of BPK do not contain false material information or fact nor do they omit material or facts; and
4. Responsible for BPK compliance to the regulations and internal control.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is confirmed to the best of our knowledge and belief.

Jakarta,

26 Mei 2016 / May 26, 2016



Hendar Ristriawan
Sekretaris Jenderal / Secretary General
NIP. 195803211978021001

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 018/LAI/WBS/V/2016

Kepada Yang Terhormat:

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI,
dan
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

No. 018/LAI/WBS/V/2016

To the Honorable:

Chairman of The House of Representatives of
The Republic of Indonesia, and
Chairman of The Audit Board of
The Republic of Indonesia

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA / THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Kami telah mengaudit laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terlampir, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2015 serta laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu ringkasan kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lain.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas.

We have audited the accompanying financial statement of the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI), which comprise the balance sheet as of December 31, 2015, and the statement of budget realization, operation and changes in equity for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Government Accounting Standards in Indonesia, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and State Auditing Standards issued by the Audit Board of the Republic of Indonesia. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control.

Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan dasar bagi opini kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 31 Desember 2015, realisasi anggaran dan kinerja keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan di Indonesia.

Hal lain

BPK RI mulai tahun 2015 untuk pertama kali mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dan penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam implementasi pertama ini, sesuai dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No.4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan, BPK RI tidak melakukan penyajian kembali atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2014.

Laporan atas ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern kami sampaikan dalam laporan secara terpisah kepada manajemen dengan laporan kami No.019/LAI/WBS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 dan No.020/LAI/WBS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.

An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Audit Board of the Republic of Indonesia as of December 31, 2015, budget realization and its financial performance for the year then ended, in accordance with Government Accounting Standards in Indonesia.

Other matter

BPK RI in 2015 for the first time implementing accrual basis accounting and the preparation of financial statements in accordance with Government Regulation No. 71 Year 2010 concerning the Government Accounting Standards. In this first implementation, BPK RI in accordance with the Interpretation of Statement of Government Accounting Standards (IPSAP) No. 4 about The Accounting Policy Changes and Error Corrections Without Restatement of Financial Statements, BPK RI did not undertake a restatement of the Financial Statements as of December 31, 2014.

Report on other legal and regulatory requirement

Compliance with Laws and Regulations and the Internal Control we submitted in separate reports to the management with our report No.019/LAI/WBS/V/2016 dated May 26, 2016 and No.020/LAI/WBS/V/2016 dated May 26, 2016.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK
WISNU B. SOEWITO & REKAN**
Ijin Usaha No. KEP - 183/KM.6/2004



Wisnu B. Soewito, CPA
Nomor Register Akuntan Publik: AP. 0360 /
Public Accountant Registration Number: AP. 0360
Nomor Ijin Kantor Akuntan Publik: KEP-183/KM.6/2004 /
License No. : KEP-183/KM.6/2004

**Jakarta, 26 Mei 2016/
Jakarta, May 26, 2016**

Gedung Gajah Unit ABC Lantai 6 AII
Jl. Dr. Saharjo No. III, Jakarta 12810 - Indonesia

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NERACA
31 Desember 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah)**

**THE AUDIT BOARD OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
BALANCE SHEET
December 31, 2015 and 2014
(Expressed in Rupiah)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31		
		2015	2014	
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas di Bendahara Pengeluaran	2d.1, 5	1.080.020.301	23.184.516.607	Cash in Disbursing Treasurer
Kas Lainnya dan Setara Kas	2d.1, 6	8.016.149.205	6.389.229.629	Other Cash and Cash Equivalent
Belanja Dibayar di Muka	2d.1, 7	141.705.007	217.935.589	Prepaid Expenditure
Piutang Bukan Pajak	2d.1, 8	6.054.726.802	1.347.199.266	Non-Taxable Receivable
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak		(30.273.625)	(6.735.996)	Allowance for doubtful -Non-Taxable Receivable
Bagian Lancar Tagihan TP/ TGR	2d.1,2f, 9	52.046.296	52.046.296	Current Portion of Indemnification Claim - net
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar		(2.829.630)	(2.829.630)	Allowance for doubtful -Current portion
Tagihan TP/TGR				Indemnification Claim
Persediaan	2d.1,10	15.239.607.433	16.030.405.208	Inventories
Jumlah Aset Lancar		30.551.151.789	47.211.766.969	Total Current Assets
Aset Tetap				Fixed Assets
Tanah	2.d2, 11	1.683.898.357.020	1.623.299.801.062	Land
Peralatan dan Mesin	2.d2, 11	1.533.853.855.269	1.381.978.601.359	Equipment and Machinery
Gedung dan Bangunan	2.d2, 11	2.051.349.458.670	1.992.440.347.363	Building and Properties
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.d2, 11	295.508.390.757	285.956.522.472	Road, Irrigation, and Transmission Network
Aset Tetap Lainnya	2.d2, 11	60.921.615.023	50.641.702.070	Other Fixed Assets
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.d2, 11	189.913.722.175	8.996.220.885	Construction in Progress
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.d2, 11	(1.483.127.104.911)	(1.237.205.423.689)	Accumulated Depreciation
Jumlah Aset Tetap		4.332.318.294.003	4.106.107.771.522	Total Fixed Assets
Piutang Jangka Panjang	2.d3, 12			Long-term Receivables
Tagihan TP/ TGR - bersih		2.566.962.548	2.316.696.744	Indemnification Claim - net
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR		(2.566.962.548)	(2.316.696.744)	Allowance for doubtful -Indemnification Claim
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-	Total Long-term Receivables
Aset Lainnya				Other Assets
Aset Tak Berwujud	2d.4,13a	123.212.943.984	102.622.959.523	Intangible Assets
Aset Lain-lain - bersih	2d.4,13b	29.421.987.171	12.759.055.169	Other Assets - net
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya		(26.788.670.985)	(10.113.261.623)	Amortization Others asset
Jumlah Aset Lainnya		125.846.260.170	105.268.753.069	Total Other Assets
JUMLAH ASET		4.488.715.705.962	4.258.588.291.560	TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN				LIABILITIES
Kewajiban Jangka Pendek				Short-term Liabilities
Utang kepada Pihak Ketiga	2e,14a	55.829.471.140	49.243.939.185	Account Payable - Third Parties
Pendapatan Diterima di Muka	2e,2g,14b	1.228.579.505	1.330.883.422	Unearned Revenues
Uang Muka dari KPPN	2e,14c	1.080.020.301	23.184.516.607	Advance Payment from KPPN
Utang Jangka Pendek Lainnya	2e,14d	243.157.399	94.761.400	Other Short-term Liabilities
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		58.381.228.345	73.854.100.614	Total Short-term Liabilities
JUMLAH KEWAJIBAN		58.381.228.345	73.854.100.614	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas	2f, 15	4.430.334.477.617	4.184.734.190.946	Equity
JUMLAH EKUITAS		4.430.334.477.617	4.184.734.190.946	TOTAL EQUITY
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.488.715.705.962	4.258.588.291.560	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATEMENT OF BUDGET REALIZATION
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2015 and 2014
(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2015			2014	
		Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization	%	Realisasi/ Realization	
PENDAPATAN	2.a, 3					REVENUES
Penerimaan Negara Bukan Pajak		1.805.970.299	14.902.755.670	825,19	24.503.525.195	Non - Tax Incomes
JUMLAH PENDAPATAN		1.805.970.299	14.902.755.670	825,19	24.503.525.195	TOTAL REVENUES
BELANJA	2.b, 4					EXPENDITURES
Belanja Operasi						Operation Expenditures
Belanja Pegawai		1.029.591.428.000	991.017.379.999	96,25	817.812.034.666	Employee Expenditures
Belanja Barang		1.432.841.649.000	1.254.647.241.385	87,56	1.180.569.700.096	Goods Expenditures
Jumlah Belanja Operasi		2.462.433.077.000	2.245.664.621.384	91,20	1.998.381.734.762	Total Operation Expenditures
Belanja Modal						Capital Expenditures
Belanja Tanah		51.800.000.000	51.681.600.000	99,77	31.105.300.000	Land Expenditures
Belanja Peralatan dan Mesin		206.861.023.000	204.825.704.442	99,02	130.505.219.524	Equipment and Machinery Expenditures
Belanja Gedung dan Bangunan		271.896.769.000	270.774.457.241	99,59	133.327.415.893	Building and Property Expenditures
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-	-	-	Road, Irrigation and Transmission Expenditures
Belanja Modal lainnya		22.532.929.000	22.742.752.961	100,93	13.211.982.767	Other Capital Expenditures
Jumlah Belanja Modal		553.090.721.000	550.024.514.644	99,45	308.149.918.184	Total Capital Expenditures
JUMLAH BELANJA		3.015.523.798.000	2.795.689.136.028	92,71	2.306.531.652.946	TOTAL EXPENDITURES

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN OPERASIONAL
31 Desember 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah)**

**THE AUDIT BOARD OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATEMENT OF OPERATION
December 31, 2015 and 2014
(Expressed in Rupiah)**

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31		
		2015	2014	
KEGIATAN OPERASIONAL				OPERATIONAL ACTIVITIES
PENDAPATAN				REVENUES
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2c.1, 16	9.125.769.609	-	Non-Tax State Revenues
Jumlah Pendapatan		9.125.769.609	-	Total Revenues
BEBAN				EXPENSES
Beban Pegawai	2.c2, 17	998.466.459.703	-	Employee Expenses
Beban Persediaan	2.c2, 18	53.588.710.004	-	Supply Expenses
Beban Barang dan Jasa	2.c2, 19	444.818.851.490	-	Goods and services Expenses
Beban Pemeliharaan	2.c2, 20	90.739.534.122	-	Maintenance Expenses
Beban Perjalanan Dinas	2.c2, 21	685.081.418.040	-	Official Travel Expenses
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat		-	-	Goods Submitted to Community Expenses
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.c2, 22	283.571.259.588	-	Depreciation and Amortization Expenses
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	2.c2, 23	279.720.578	-	Allowance for doubtful Expenses
Beban Lain-lain		-	-	Others Expense
Jumlah Beban		2.556.545.953.525	-	Total Expenses
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(2.547.420.183.916)	-	Surplus(Defisit) of Operational Activities
KEGIATAN NON OPERASIONAL				NON OPERATIONAL ACTIVITIES
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar	2c.4,24	(5.552.779.802)	-	Surplus(Deficit) of Disposal of Noncurrent Assets
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	Surplus(Deficit) of Longterm Liabilities
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		5.589.393.475	-	Surplus(Deficit) of Other Non-operation Activities
SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		36.613.673	-	SURPLUS(DEFICIT) OF OPERATIONAL ACTIVITIES
SURPLUS / DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.547.383.570.243)	-	SURPLUS(DEFICIT) BEFORE EXTRAORDINARY ITEMS
POS LUAR BIASA				EXTRAORDINARY ITEMS
Pendapatan Luar Biasa				Extra Ordinary Revenues
Beban Luar Biasa				Extra Ordinary Expenses
SURPLUS / DEFISIT LO		(2.547.383.570.243)	-	SURPLUS (DEFICIT) OF STATEMENT OF OPERATIONS

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2015 and 2014
(Expressed in Rupiah)

	Catatan/	2015	2014	
EKUITAS AWAL	2.f, 4	4.184.734.190.946	-	BEGINNING BALANCES OF EQUITY
SURPLUS (DEFISIT) LO		(2.547.383.570.243)	-	SURPLUS(DEFISIT) SO
PENYESUAIAN NILAI TAHUN BERJALAN		381.538.847	-	<i>Adjustment Value Current Year</i>
Penyesuaian Nilai Aset		381.538.847	-	<i>Adjustment Value Assets</i>
Penyesuaian Nilai Kewajiban		-	-	<i>Adjustment Value of Liabilities</i>
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		(15.180.389.541)	-	CUMULATIVE IMPACT OF CHANGES IN POLICY /
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR				FUNDAMENTAL ERRORS
Koreksi Nilai Persediaan		30.493.376	-	<i>Correction Value Inventory</i>
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-	<i>Difference of fixed asset revaluation</i>
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		(14.831.719.006)	-	<i>Correction Value Asset Non Revaluation</i>
Lain-lain		(379.163.911)	-	<i>Others</i>
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS		2.807.782.707.608	-	<i>Transaction between Entities</i>
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		245.600.286.671	-	SURPLUS/DEFICIT OF EQUITY
EKUITAS AKHIR		4.430.334.477.617	-	ENDING BALANCE OF EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2015 and 2014
(Expressed in Rupiah)

1. Umum

General 1.

a. Pendirian

Establishment a.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK RI") berdiri di Magelang pada tanggal 28 Desember 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/ OEM dan mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1947. Dalam kondisi revolusi, kantor BPK RI menumpang dan berpindah-pindah. Terakhir menempati gedung di Jalan Tugu No. 2 Yogyakarta.

The Audit Board of the Republic of Indonesia ("BPK RI") was established in Magelang on December 28, 1946 under Governmental Decree No. 11/ OEM and started its operations on January 1, 1947. During the revolution, BPK RI shared its office with other offices and constantly moving from one place to another. The last building used as office was on Jalan Tugu No. 2 Yogyakarta.

Dengan dibentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), dibentuk Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan Konstitusi RIS. Kemudian dengan berdirinya Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950), maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan Republik Indonesia yang merupakan gabungan dari Dewan Pengawas Keuangan RIS di Bogor dan BPK di Yogyakarta. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 1959.

Following the establishment of the United States of the Republic of Indonesia (RIS), Financial Supervisory Board was formed under the RIS Constitution. After the establishment of the Republic of Indonesia under the Provisional Constitution of 1950 (UUDS 1950), Financial Supervisory Board of the Republic of Indonesia was established as the consolidation of RIS Financial Supervisory Board in Bogor and BPK in Yogyakarta. This condition continued until 1959.

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden RI pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), maka sesuai ketentuan UUD 1945 pasal 23 ayat 5, nama Dewan Pengawas Keuangan kembali menjadi BPK RI. Selama periode ini, Pemerintah Indonesia dan BPK RI berusaha sekuatnya untuk mewujudkan Undang-Undang tentang BPK RI sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 23 ayat 5. Sementara itu telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 7 Tahun 1963 dan Perppu No. 6 Tahun 1964 tentang BPK Gaya Baru.

Due to issuance of Presidential Decree on July 5, 1959 declaring the reinstatement of the 1945 Constitution, and in accordance with Article 23 paragraph 5 of the 1945 Constitution, the name 'Financial Supervisory Board' was rechanged into BPK RI. During this period, both the Indonesian Government and BPK RI tried their best to formulate a Law regarding BPK RI that is in accordance with the mandate in Article 23 paragraph 5 of the 1945 Constitution. Meanwhile, Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 7 of 1963 and Perpu No. 6 of 1964 regarding BPK Gaya Baru (New-Style Audit Board) were issued.

BPK RI sendiri telah berusaha membahas Perppu No. 6 Tahun 1964 untuk menjadikannya sebagai Undang-Undang, yaitu dengan menyusun konsep Rancangan Undang-Undang tentang BPK RI, yang kemudian setelah diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 1965. Dengan begitu, BPK RI berubah menjadi BPK Gaya Baru yang berada di bawah Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi. Namun kemudian dengan ketetapan MPRS No. X/MPRS 1966, tanggal 5 Juli 1966, kedudukannya dikembalikan pada posisi dan fungsinya sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945.

BPK RI itself had tried to discuss Perpu No. 6 of 1964 to be stipulated as a Law by formulating a draft of Law regarding BPK RI, which after being filed by the Government to the People's Legislative Assembly (DPR) was approved and ratified as Law No. 17 of 1965. Therefore, BPK RI changed into BPK Gaya Baru under the President/Great Leader of Revolution. Later on, under the Decree of MPRS (Provisional People's Consultative Assembly) No. X/MPRS 1966 dated July 5, 1966, it was reinstated to its position and function as regulated in the 1945 Constitution.

Pada tahun 1973 dikeluarkan Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1973 tentang BPK RI, yang mengganti dan mencabut UU No. 17 Tahun 1965. Pada tahun 2006, UU No. 5 Tahun 1973 tersebut telah diganti dengan UU No. 15 Tahun 2006. UU inilah yang menjadi dasar keberadaan BPK RI saat ini.

In 1973, Law No. 5 of 1973 regarding BPK RI was issued, substituting and revoking Law No. 17 of 1965. In 2006, Law No. 5 of 1973 was substituted with Law No. 15 of 2006. This Law has become the ground for the existence of BPK RI.

b. Susunan Keanggotaan dan Bentuk Organisasi BPK RI

Board Members and Organizational Structure of BPK RI b.

Anggota BPK RI dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR dan diresmikan oleh Presiden. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 yang merupakan pengganti UU No. 5 Tahun 1973, BPK RI mempunyai 9 (sembilan) orang anggota yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. Sembilan anggota ini terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan 7 (tujuh) orang anggota.

Board Members are selected by DPR by taking into account the consideration of DPR and are officially ratified by the President. Pursuant to Law No. 15 of 2006, substitute to Law No. 5 of 1973, BPK RI has 9 (nine) members whose membership are officially ratified in a Presidential Decree. These members consist of a chairman concurrently serving as a member, a vice chairman concurrently serving as a member, and 7 (seven) members.

Susunan keanggotaan BPK RI pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

The board members of BPK RI as of December 31, 2015 and 2014 consists of the following:

	2015
Ketua	Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.
Wakil Ketua	Drs. Sapto Amal Damandari, Ak, C.P.A.
Anggota I	Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.
Anggota II	Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak.
Anggota III	Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi
Anggota IV	Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M
Anggota V	Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE Ak, MM, CPA
Anggota VI	Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A.
Anggota VII	Achsanal Qosasi

	2014	
Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.	:	Chairman
Drs. Sapto Amal Damandari, Ak, C.P.A.	:	Vice Chairman
Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.	:	Board Member I
Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak.	:	Board Member II
Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi	:	Board Member III
Prof. Dr. H. Rizal Djalil, M.M	:	Board Member IV
Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE Ak, MM, CPA	:	Board Member V
Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A.	:	Board Member VI
Achsanal Qosasi	:	Board Member VII

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2015 and 2014
(Expressed in Rupiah)

1. Umum (lanjutan)

c. Tempat Kedudukan BPK

Dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah tentang keuangan negara, BPK RI dibantu oleh pelaksana BPK RI. Saat ini, pelaksana BPK RI terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Jenderal, 1 (satu) Inspektorat Utama, 2 (dua) Direktorat Utama, 7 (tujuh) Auditorat Utama Keuangan Negara, dan 5 (lima) Staf Ahli.

BPK Pusat berdomisili di Jalan Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, dan memiliki Kantor Perwakilan dan Satuan Kerja (satker) sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal BPK dan BPK RI Pusat, Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Jl. Binawarga II, Jakarta Selatan.
- BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jl. Imam Bonjol No. 22, Medan.
- BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Jl. Demang Lebar Daun No. 2, Palembang.
- BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Jl. MT. Haryono Kav. 34, Pancoran, Jakarta Selatan.
- BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta.
- BPK Perwakilan Provinsi Bali, Jl. D.I. Panjaitan, Renon, Denpasar.
- BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. A Yani km. 32,5, Banjarbaru, Banjarmasin.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Andi Pangeran Pettarani, Makassar.
- BPK Perwakilan Provinsi Papua, Jl. Balaikota No.2, Entrop Jayapura.
- BPK Perwakilan Provinsi Aceh, Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh.
- BPK Perwakilan Provinsi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 721, Pekanbaru.
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jl. Moh Toha No. 164, Bandung.
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Juanda, Sidoarjo, Surabaya.
- BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Jl. Pulau Irian No.12, Tarakan.
- BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Ahmad Yani No. 121, Pontianak.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Jl. 17 Agustus No.4, Manado.
- BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Jl. Moh. Yamin No. 19, Samarinda.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Jl. Sao - Sao No. 10, Kendari.
- BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Yos Sudarso No. 16, Palangkaraya.
- BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat, Jl. Sowi Gunung No.4, Manokwari.
- BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Jl. Laksdya Leo Wattimena, Passo, Ambon.
- BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jl. Pangeran Emir M. Noor No.11B, Sumur Putri, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.
- BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Jl. Monomotu No. 12, Ternate.
- BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jl. Amabi No. 120, Kupang.
- BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Jl. P. Hidayat Km 6,5 No. 65, Kel. Sukakarya, Kota Baru, Jambi.
- BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang.
- BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Jl. Kartini I No. 29-30 Sekupang, Batam.

General (continued) 1.
BPK Working Units c.

In conducting state financial management and accountability audit, BPK RI is assisted by implementers. At present, Implementers of BPK RI are Secretariat General, Principal Inspectorate, 2 (two) Principal Directorates, 7 (seven) Principal Auditorates, and 5 (five) Expert Staffs.

BPK Headquarter is located at Jalan (Jl.) Gatot Subroto No. 31, Central Jakarta. BPK has Representative Offices and other Working Units (satker) as follows:

- Secretariat General of BPK and BPK RI Headquarter, Jl. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta.*
- Education and Training Center, Jl. Binawarga II, South Jakarta.*
- BPK Representative Office in Sumatera Utara, Jl. Imam Bonjol No. 22, Medan.*
- BPK Representative Office in Sumatera Selatan, Jl. Demang Lebar Daun No. 2, Palembang.*
- BPK Representative Office in DKI Jakarta, Jl. MT. Haryono Kav. 34, Pancoran, South Jakarta.*
- BPK Representative Office in Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta.*
- BPK Representative Office in Bali, Jl. D.I. Panjaitan, Renon, Denpasar.*
- BPK Representative Office in Kalimantan Selatan, Jl. A. Yani km. 32,5, Banjarbaru, Banjarmasin.*
- BPK Representative Office in Sulawesi Selatan, Jl. Andi Pangeran Pettarani, Makassar.*
- BPK Representative Office in Papua, Jl. Balaikota No.2, Entrop, Jayapura.*
- BPK Representative Office in Aceh, Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh.*
- BPK Representative Office in Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 721, Pekanbaru.*
- BPK Representative Office in Jawa Barat, Jl. Moh Toha No. 164, Bandung.*
- BPK Representative Office in Jawa Timur, Jl. Raya Juanda, Sidoarjo, Surabaya.*
- BPK Representative Office in Kalimantan Utara, Jl. Pulau Irian No.12, Tarakan.*
- BPK Representative Office in Kalimantan Barat, Jl. Ahmad Yani No. 121, Pontianak.*
- BPK Representative Office in Sulawesi Utara, Jl. 17 Agustus No. 4, Manado.*
- BPK Representative Office in Kalimantan Timur, Jl. Moh. Yamin No. 19, Samarinda.*
- BPK Representative Office in Sulawesi Tenggara, Jl. Sao - Sao No.10, Kendari.*
- BPK Representative Office in Kalimantan Tengah, Jl. Yos Sudarso No. 16, Palangkaraya.*
- BPK Representative Office in Papua Barat, Jl. Sowi Gunung No. 4, Manokwari.*
- BPK Representative Office in Maluku, Jl. Laksdya Leo Wattimena, Passo, Ambon.*
- BPK Representative Office in Lampung, Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11 B, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.*
- BPK Representative Office in Maluku Utara, Jl. Monomotu No. 12, Ternate.*
- BPK Representative Office in Nusa Tenggara Timur, Jl. Amabi No. 120, Kupang.*
- BPK Representative Office in Jambi, Jl. P. Hidayat Km 6,5 No. 65, Kel. Sukakarya, Kota Baru, Jambi.*
- BPK Representative Office in Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang.*
- BPK Representative Office in Kepulauan Riau, Jl. Kartini I No.29 - 30 Sekupang, Batam.*

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2015 and 2014
(Expressed in Rupiah)

1. Umum (lanjutan)

c. Tempat Kedudukan BPK (lanjutan)

- BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jl. Udayana No. 22, Mataram.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Jl. Prof Moh. Yamin No. 35, Palu.
- BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jl. Tina Loga No.3, Kota Utara, Gorontalo.
- BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Jl. Pembangunan No. 16, Padang Harapan, Bengkulu.
- BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Terpadu, Air Itam, Pangkal Pinang.
- BPK Perwakilan Provinsi Banten, Jl. Raya Palka No. 1, Palima, Serang, Banten.
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 175, Semarang.
- BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kec. Simboro, Mamuju.

d. Dasar Hukum BPK

Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum kegiatan BPK adalah:

- Pasal 23 E, Pasal 23 F dan Pasal 23 G Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang No.3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.27 Tahun 2014 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

General (continued) 1.

BPK Working Units (continued) c.

- *BPK Representative Office in Nusa Tenggara Barat, Jl. Udayana No. 22, Mataram.*
- *BPK Representative Office in Sulawesi Tengah, Jl. Prof Moh. Yamin No. 35, Palu.*
- *BPK Representative Office in Gorontalo, Jl. Tina Loga No. 3, Kota Utara, Gorontalo.*
- *BPK Representative Office in Bengkulu, Jl. Pembangunan No. 16, Padang Harapan, Bengkulu.*
- *BPK Representative Office in Kepulauan Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Terpadu, Air Itam, Pangkal Pinang.*
- *BPK Representative Office in Banten, Jl. Raya Palka No. 1, Palima, Serang, Banten.*
- *BPK Representative Office in Jawa Tengah, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 175, Semarang.*
- *BPK Representative Office in Sulawesi Barat, Jl. H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kec. Simboro, Mamuju.*

Legal Basis of BPK d.

Laws and regulations serving as the legal basis of BPK activities are as follows:

- *Article 23 E, Article 23 F and Article 23 G of the 1945 Constitution.*
- *Law No. 15 of 2006 regarding of the Audit Board of the Republic of Indonesia.*
- *Law No. 1 of 2004 regarding State Treasury.*
- *Law No. 17 of 2003 regarding State Finance.*
- *Law No. 15 of 2004 regarding Audit on State Financial Management and Accountability.*
- *Law No. 27 of 2014 regarding Amendment of Law No. 3 of 2015 regarding State Budget For the Year 2015.*
- *Government Regulation No. 8 of 2006 regarding the Financial and Performance Reporting for Government Agencies.*
- *Government Regulation No. 71 of 2010 regarding Government Accounting Standards.*
- *Minister of Finance Regulation No. 238 / PMK.05 / 2011 on general guidelines for the Government Accounting System*
- *Minister of Finance Regulation No.120/PMK.06/2007 regarding Administration of State Property*
- *Minister of Finance Regulation No.1/PMK.06/2013 regarding Depreciation of State-Owned Fixed Assets in Central Government Entity.*
- *Minister of Finance Regulation No.214/PMK.05/2013 regarding of the Standard Chart of Accounts.*
- *Minister of Finance Regulation No.90/PMK.06/2014 regarding Amendement the Regulation of the Minister of Finance No. 1 / PMK.06/2013 on State Assets Depreciation of Fixed Assets From of the Central Government Entities.*
- *Minister of Finance Regulation No.69/PMK.06/2014 regarding Determination of Accounts Receivable Quality and Allowance for Doubtful Accounts the Formation of the Ministry/Agency and the State Treasurer.*

1. Umum (lanjutan)

d. Dasar Hukum BPK (lanjutan)

General (continued) 1.

Legal Basis of BPK (continued) d.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor.213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Minister of Finance Nomor.213 / PMK.05 / 2013 On Accounting and Financial Reporting System of the Central Government

Peraturan Menteri Keuangan Nomor.215/PMK.05/2013 Tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat.

Minister of Finance Nomor.215 / PMK.05 / 2013 About the Journal of Accounting Government On Central Government .

Peraturan Menteri Keuangan Nomor.219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Minister of Finance Nomor.219 / PMK.05 / 2013 On Accounting Policy of the Central Government .

Peraturan Menteri Keuangan Nomor.270/PMK.05/2014 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Pusat.

Minister of Finance Nomor.270 / PMK.05 / 2014 On Implementation of Accrual Based Government Accounting Standards In the Central Government .

Peraturan Menteri Keuangan Nomor.177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Minister of Finance Nomor.177 / PMK.05 / 2015 on Guidelines for Preparation and Submission of Financial Statements Ministry / Agency .

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Minister of Finance Decree No.53/KM.6/2012 regarding Application of State Property Depreciation of Fixed Assets in the Form of the Central Government Entities

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat.

Minister of Finance Decree No.59/KM.6/2013 regarding Useful Life Table.

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Minister of Finance Decree No.94/KM.6/2013 regarding Module of State Property Depreciation of Fixed Assets in the Form of Central Government Entities.

- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Minister of Finance Decree No.145/KM.6/2014 regarding Amendment to the Decree of the Minister of Finance No. 94/ KM. 6/2013 on State Property Depreciation Module Form of Fixed Assets in the Central Government Entities.

- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.

Director General of Treasury Regulations No. PER-82/PB/2011 regarding Accounting Guidelines Allowance for Doubtful Accounts at Ministry/Agency.

- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Director General of Treasury Regulations No. PER-85/PB/2011 regarding Receivables Administration non-tax Revenues at Unit Ministry/Agenc.

- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non-Anggaran dan Neraca pada Bagian Akun Standar.

Director General of Treasury Regulations No. PER-42/PB/2012 regarding Additions and Changes in Non-Budget Account and Balance Sheet in the Standard Chart of Accounts.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagian Akun Standar.

Director General of Treasury Regulation No. KEP - 311 / NT / 2014 on the Account Segment codification Standard Chart of Accounts .

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK

Duties and Function of BPK e.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006, Bab III Bagian Kesatu Pasal 6 tentang Tugas BPK, antara lain disebutkan bahwa :

Based on Law No. 15 Year 2006 dated October 30, 2006, Chapter III Part One Article 6 regarding Duties of BPK are as follows:

- BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

BPK has the duties to audit state financial management and accountability performed by the Central and Regional Government, other State Institutions, Central Bank of Indonesia (BI), State-Owned Enterprises (BUMN), Public Service Agencies (BLU), Regional-Owned Enterprises (BUMD), and other institutions or agencies managing state financial.

- Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

The audit intended in paragraph (1) is implemented under Law regarding Audit on State Financial Management and Accountability.

- Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Audit by BPK includes financial audit, performance audit, and special-purpose audit.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2015 and 2014
(Expressed in Rupiah)

1. Umum (lanjutan)

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK (lanjutan)

Sedangkan sesuai Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 3/K/I-XIII, 2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan RI khususnya pada Bab II tentang susunan, tugas dan fungsi antara lain disebutkan bahwa pelaksana BPK dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut :

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Inspektorat Utama;
- c. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- d. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
- e. Auditorat Utama Keuangan Negara I;
- f. Auditorat Utama Keuangan Negara II;
- g. Auditorat Utama Keuangan Negara III;
- h. Auditorat Utama Keuangan Negara IV;
- i. Auditorat Utama Keuangan Negara V;
- j. Auditorat Utama Keuangan Negara VI;
- k. Auditorat Utama Keuangan Negara VII;
- l. BPK Perwakilan;
- m. Staf Ahli;
- n. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa

Adapun tugas dan fungsi masing - masing Pelaksana BPK dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tugas Sekretariat Jenderal (Setjen) adalah menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK.

Sedangkan Fungsi Sekretariat Jenderal (Setjen), antara lain :

- Perumusan dan Pengevaluasian rencana aksi Setjen dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan Setjen berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Setjen;
- Perumusan kebijakan dibidang kesekretariatan dan keprotokolan, hubungan masyarakat dan kerja sama internasional, sumber daya manusia, keuangan,
- Pembinaan di bidang kesekretariatan dan keprotokolan, hubungan masyarakat dan kerja sama internasional, sumber daya manusia, keuangan, teknologi informasi, prasarana dan sarana, administrasi umum serta diklat;
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal; dan
- Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Tugas dan fungsi Inspektorat Utama (Itama) adalah :

- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Itama dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan Itama berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Itama;
- Perumusan kebijakan penegakan integritas dan nilai etika di lingkungan BPK;
- Perumusan kebijakan reviu atas sistem pengendalian mutu pemeriksaan dan kelembagaan;
- Perumusan kebijakan reviu atas konsep Laporan Keuangan BPK dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPK;
- Perumusan kebijakan penegakan integritas dan nilai etika di lingkungan BPK termasuk terkait tugas Majelis Kehormatan Kode Etik BPK
- Penyusunan Laporan Tahunan Reviu Sistem Pengendalian Mutu (SPM) BPK;
- Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Itama; dan
- Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

Tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Keuangan Negara adalah menyelenggarakan perencanaan strategis dan manajemen kinerja, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan.

General (continued) 1.

Duties and Function of BPK (continued) e.

Based on Decree of BPK RI No. 3/K/I-XIII/2/7/2014 dated July 10, 2014 regarding Organization and Work Order of the Implementer Audit Board of the Republic of Indonesia, specifically Chapter II regarding arrangement, task and function, Implementers of BPK is specified as follows :

- | | |
|---|----|
| Secretariat General; | a. |
| Principal Inspectorate; | b. |
| Principal Directorate of Planning, Evaluation and Development of State Financial Audit; | c. |
| Principal Directorate of Mentoring and Development of Law in State Financial Audit; | d. |
| Principal Auditorate of State Finance I; | e. |
| Principal Auditorate of State Finance II; | f. |
| Principal Auditorate of State Finance III; | g. |
| Principal Auditorate of State Finance IV; | h. |
| Principal Auditorate of State Finance V; | i. |
| Principal Auditorate of State Finance VI; | j. |
| Principal Auditorate of State Finance VII; | k. |
| Representative Office of BPK RI; | l. |
| Expert Staff; | m. |
| Functional Position Group examiner. | n. |

Duties and function of each Implementer are as follows:

The duty of Secretariat General (Setjen) is to organize and coordinate the administrative and resources support for the good order of duties and function of BPK and Implementer of BPK.

Function held by Setjen, are as follows:

- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- *Formulation of working plan based on its action plan, duties and function;*
- *Giving a consideration on aspects of internal control in order to improve system and working procedure.*
- *Coaching in the areas of secretarial and protocol, public relations and international cooperation, human resources, finance, information technology, infrastructure and facilities, public administration and education and training;*
- *Preparation of Performance Accountability Report of the General Secretariat; and*
- *Reporting the results of activities periodically to the BPK.*

Duties and function held by Principle Inspectorate (Itama), are as follows:

- *Formulation and evaluation of the action plan Equal to identify key performance indicators based on the planned implementation of the BPK strategic plan;*
- *Formulation activity plan based on the action plan as well as the duties and functions of Itama;*
- *Formulation of policy reviews the quality control system inspection and institutional;*
- *Formulation of policy reviews the concept of Financial Statements BPK and the Work Plan and Budget (RKA) BPK;*
- *Policy formulation enforcement of integrity and ethical values in the BPK, including related duties of the Council of Honor Code BPK*
- *Preparation of the Annual Report of the Review Quality Control System BPK;*
- *Preparation of Performance Accountability Report; and*
- *Reporting the results of activities periodically to the BPK.*

The duty of Principal Directorate of Planning, Evaluation, Development, Education and Training of State Financial Audit (Ditama Revbang) is to organize strategic planning and performance management, audit evaluation and reporting, research and development, education and training.

1. Umum (lanjutan)

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK (lanjutan)

General (continued) 1.

Duties and Function of BPK (continued) e.

Sedangkan Fungsi Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Keuangan Negara, antara lain:

- Perumusan kebijakan di bidang perencanaan strategis dan manajemen kinerja, pengevaluasian dan pelaporan pemeriksaan, serta penelitian dan pengembangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan strategis dan manajemen kinerja, pengevaluasian dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan;
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Ditama Revbang dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK.

Tugas Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum) Pemeriksaan Keuangan Negara adalah memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada Anggota BPK dan Pelaksana BPK, legislasi, pelayanan informasi hukum, serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah.

Sedangkan Fungsi Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, antara lain:

- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Ditama Binbangkum dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan Ditama Binbangkum berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Ditama Binbangkum;
- Perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum dan kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah, serta legislasi, analisis, bantuan hukum, dan pelayanan informasi hukum.

Tugas Auditorat Utama Keuangan Negara I (AKN I) adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Sedangkan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara I, antara lain:

- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN I dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan AKN I berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN I;
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN I, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN I maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara II, antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN II dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan dan rencana kegiatan AKN II berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN II;
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN II, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN II maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Function held by Ditama Revbang, are as follows:

- *Formulation policy in strategic planning and performance management, audit evaluation and reporting, research and development.*
- *Implementation policy in strategic planning and performance management, audit evaluation and reporting, research and development, education and training.*
- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan.*

The duty of Principal Directorate of Mentoring and Development of Law in State Financial Audit (Ditama Binbangkum) is to give consultation and legal support to Board Members and Implementers, legislation, support in law information, and legal registration task in the completion of state/regional loss.

Function held by Ditama Binbangkum, are as follow:

- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- *Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*
- *Formulation of policy in legal consultation and registration in the completing of state/ regional loss, legislation, analysis, legal support and legal information service.*

The duty of Principal Auditorate of State Finance I (AKN I) is to audit state financial management and accountability on politic, law, defense and security.

Function held by AKN I, are as follows:

- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- *Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*
- *Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty either conducted by AKN I itself or delegated to representative office, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit;*

Duties and function held by Principle Auditorate of State Finance II (AKN II), are as follows:

- *State financial management and accountability audit on economic and national development planning.*
- *Formulation and evaluation action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- *Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*
- *Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN II itself or delegated to representative office, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit;*

1. Umum (lanjutan)

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK (lanjutan)

General (continued) 1.

Duties and Function of BPK (continued) e.

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara III (AKN III), antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, dan riset dan teknologi;
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN III dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan AKN III berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN III;
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN III, baik yang pemeriksaannya dilakukan oleh AKN III maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Duties and function held by Principle Auditorate of State Financial III (AKN III), are as follows:

- *State financial management and accountability audit on state institution, people prosperity, state secretariat, state apparatus, research and technology;*
- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- *Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*

- *Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN III itself or delegated to representative office, which includes financial audit, performance audit, and special-purpose audit.*

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara IV (AKN IV), antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur;
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN IV dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan AKN IV berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN IV;
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah pada lingkup tugas AKN IV, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN IV maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Duties and function held by Principle Auditorate of State Finance IV (AKN IV), are as follows:

- *State financial management and accountability audit on environment, natural resources management and infrastructure.*

- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*

- *Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*

- *Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN IV itself or delegated to representative office, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit.*

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V), antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (BRR NAD-Nias), dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Sumatera dan Jawa;
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN V dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan AKN V berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN V;
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah pada lingkup tugas AKN V, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN V maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Duties and function held by Principal Auditorates of State Finance V (AKN V), are as follows:

- *State financial management and accountability audit on Ministry of Home Affairs, Ministry of Religious Affairs, Reconstruction and Rehabilitation Agency for NAD-NIAS, Industrial Region Development Authority of Batam Island, as well as regional finance and separated regional wealth of Regional Governments in Sumatera and Java;*

- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*

- *Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*

- *Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN V itself or delegated to representative offices, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit.*

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara VI (AKN VI), antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pendidikan Nasional, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Duties and function held by Principle Auditorates of State Finance VI (AKN VI), are as follows:

- *State/regional financial management and accountability audit on Ministry of Health, Drug and Food Supervisory Agency, State Ministry for the Acceleration of Development in the Eastern Region of Indonesia, Ministry of National Education, as well as regional finance and separated regional wealth of Regional Governments in Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku and Papua.*

1. Umum (lanjutan)

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK (lanjutan)

- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN VI dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK.
- Perumusan rencana kegiatan AKN VI berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN VI.
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah pada lingkup tugas AKN VI, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN VI maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara VII (AKN VII), antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang Kekayaan Negara yang Dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara).
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN VII dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK.
- Perumusan rencana kegiatan AKN VII berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN VII.
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah pada lingkup tugas AKN VII, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN VII maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Tugas dan Fungsi Staf Ahli, antara lain:

- Memberikan kajian kepada BPK mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Utama, Direktorat Utama, dan Auditorat Utama Keuangan Negara.
- Memberikan kajian mengenai kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat, dan memberikan masukan kepada BPK mengenai kebijakan dan strategi pemeriksaannya, serta melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh BPK.

Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional, antara lain:

- Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kebijakan Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Badan Pemeriksa Keuangan mulai Tahun Anggaran 2015 untuk pertama kali mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dan penyusunan laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam implementasi pertama ini, perlakuan akuntansi atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Sesuai dengan interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No.4 tentang Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan. BPK tidak melakukan penyajian kembali atas Laporan Keuangan Tahun 2014.
2. BPK menyandingkan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 berbasis akrual dengan Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2014 berbasis kas menuju akrual.
3. Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 tersanding adalah bukan Laporan Keuangan komparatif. Pembaca laporan keuangan diharapkan memahami bahwa penyandingan tersebut bukan perbandingan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar analisis Laporan Keuangan lintas tahun.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan BPK adalah sebagai berikut:

General (continued) 1.

Duties and Function of BPK (continued) e.

- Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*
- Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN VI itself or delegated to representative offices, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit.*

Duties and function held by Principle Auditorate of State Finance VII (AKN VII), are as follow:

- State financial management and accountability audit on separated national wealth (State-Owned Enterprises).*
- Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*
- Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN VII it self or delegated to representative office, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit.*

Duties and function held by Expert Staff, among others, are:

- Providing studies on its fields of expertise not already covered by Secretariat General, Principal Inspectorates, Principal Directorates and Principal Auditorates.*
- Providing studies on state financial management and accountability policy, consideration on BPK's audit strategy and policy, as well as carrying out other duties given by BPK.*

Duties and function held by Functional Position Group, among others, are:

- Carrying out activities based on each functional position, in accordance to the regulation.*

Accounting Policies 2.

Accounting basis used in the financial statements of the government, namely the accrual basis in the preparation and presentation of the Balance Sheet, Statement of Operations and Statement of Changes in Equity and the cash basis for the preparation and presentation of report on the realization Anggaran. Basis accrual accounting is the basis which recognizes the influence of transactions and other events at the time of the transaction and it happened, regardless of when cash or cash equivalents received or paid.

BPK for in 2015 for the first time began implementing accrual basis accounting and the preparation of financial statements in accordance with Regulation Order No. 71 Year 2010 concerning the Government Accounting Standards. In this first implementation, the accounting treatment for the presentation and disclosure of financial statements is as follows:

- In accordance with the interpretation of Statement of Government Accounting Standards (IPSAP) 4 of the Accounting Policy Changes and Error Corrections Without Restatement of Financial Statements. CPC does not undertake a restatement of the Financial Statements of 2014.*
 - BPK pair Financial Statements for the period ended December 31, 2015 the accrual-based financial statements for the period ended December 31, 2014 cash basis to the accrual.*
 - Financial Statements for the period ended December 31, 2015 and 2014 Financial Statements paired is not comparative. Readers are expected to understand the financial statements that the pairing is not a comparison, so it can not be used as the basis for the analysis of financial statements across the year.*
- These are accounting policies that have been applied in the preparation of the Financial Statements of BPK are as follows:*

2. Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Accounting Policies (continued) 2.

a. Pendapatan - LRA

Revenues-SBR a.

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah saldo anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan pembukuan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Revenues-SBR (Statement of Budget Realization) are all receipts of KUN which add the current equity in the related budget year period that become the right of the government and with no repayment obligation by the government. Revenues are recognized at the time the cash is received by KUN. The accounting of revenues is conducted on gross principle, the principle that does not allow an organization unit to record the receipt in net after being deducted by the disbursement or does not allow to record the disbursement after compensation between receipt and disbursement.

Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Revenues are presented according to the types of revenue.

Pendapatan - LO

Revenues - SO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPK adalah sebagai berikut :

Revenue-SO (Statement of Operation) is the right of the central government that is recognized as an addition to equity in the period of the fiscal year in question and does not need to be repaid. Revenue is recognized when the SO-emergence of the right to income and / or realized income, ie the inflow of economic resources. In particular the recognition of income-SO on BPK is as follows:

- a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan;
- b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
- c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan;
- d. Pendapatan dari Pemindah Tangan BMN diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan penghapusan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- e. Pendapatan Pelunasan ganti rugi atas Kerugian yang Diderita oleh Negara (masuk TP/TGR) Bendahara diakui saat dikeluarkannya surat keputusan

Training Services revenue is recognized once the exercise is completed; a.

Building Rental income is recognized proportionally between the value b. and the period of the lease;

Penalty Revenue is recognized upon issuance of the decision fines or other equivalent document; c.

Revenue from hands over BMN recognized upon issuance of removal d. decisions or other equivalent document;

Repayment income compensation for Losses Suffered by the State (in e. TP / TGR) Treasurer recognized when the issuance of a decree TP / TGR or other equivalent document.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Accounting for income-LO implemented based on gross principle, namely with a record gross revenue, and does not record the net amount (after partially offset by expenditures).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Revenue presented according to the classification of revenue sources.

b. Belanja

Expenditures b.

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Expenditures are all disbursements from KUN that reduce balance budget in the related budget year period for which repayment will not be receipt by the government. Expenditures are recognized at the time of disbursement from KUN. Specifically for disbursements through the disbursing treasurer, the recognition takes place at the time that the accountability of the mentioned disbursements is approved by the State Treasury Service Office (KPPN).

Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/ jenis belanja.

Expenditures are presented on the face of the financial statements according to the economic classifications/ types of expenditure.

c. Beban

Expenses c.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Expenses are all disbursements from expenses are decreases in economic benefits or service potential in equities lowered the reporting period, which can be either expenditure or consumption of assets or incurrence of a liability. Expenses are recognized when there is an obligation; the consumption of assets; a decrease in economic benefits or service potential. Expenses are presented by economic classification / type of expenditure and further classification based on the organization and function are disclosed in the notes to the financial statements.

2. Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Accounting Policies (continued) 2.

d. Aset

Assets d.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan /atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Assets are economic resources controlled and/ or owned by the government as a result of past events and from which economic and/or social benefits are expected to be obtained in the future, either by the government or by the people, and can be measured in monetary units, including non-financial resources which are needed to provide services to the public and resources that are maintained for historical and cultural reasons. The definition of assets does not apply to natural resources such as forests, marine resources and mineable minerals. Assets are recognized at the time they are received or at the time the ownership right is transferred.

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap, Piutang Jangka Panjang dan aset lainnya.

Assets are classified into current assets, fixed assets, and other assets.

Pada Periode 30 November 2015, seluruh Aset Tetap dan Aset Tetap Lainnya pada satuan kerja Eselon I BPK Pusat telah ditransfer keluar ke satuan kerja Eselon I Setjen

In the period 30 November 2015, the entire Fixed Assets and Other Fixed Assets at the working unit Echelon I CPC Central has been transferred out to a working unit Echelon I Secretariat

d1. Aset Lancar

Current Assets d1.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

An assets is classified as current assets if expected to be realized immediately, used, or held for sale within 12 (twelve) months from the reporting date.

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas terdiri Atas

Cash presented in the balance sheet using the nominal value. Cash in foreign currencies are presented in the balance sheet using the BI middle rate at balance sheet date. Cash consists as:

Aset lancar ini terdiri dari :

The current assets consists of:

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Cash in Disbursing Treasurer a.

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka dari KPPN yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara pada tanggal neraca. Kas di bendahara pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang sumbernya berasal dari uang muka dari KPPN yang belum disetor kembali ke kas negara pada tanggal neraca.

Cash in disbursing treasurer are cash which controlled, managed and under the responsibility of the disbursing treasurer from the rest of the treasury office (KPPN) has not been accounted for or remitted back to the State Treasury at the balance sheet date. Cash in disbursing treasurer include the entire account balance treasure, coins, paper money and other sources of cash that comes from advances from the KPPN which has not been paid back to the State Treasury at the balance sheet date.

b. Kas Lainnya dan Setara Kas

Other Cash and Cash Equivalents b.

Kas lainnya dan setara kas mencakup kas lainnya di bendahara pengeluaran, yaitu kas yang berada dibawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari uang muka dari KPPN, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai.

Other cash and cash equivalents include other cash in disbursing treasurer, which is under the responsibility of the treasurer and does not come from advances from KPPN, either in bank account balances and cash balances.

Kas Lainnya dan Setara Kas berasal dari :

Other Cash and Cash Equivalents derived from:

- Pendapatan yang Belum Disetor

Revenues Has Not Been Paid

Pendapatan negara yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran pada suatu periode anggaran namun pada akhir tahun anggaran belum disetorkan ke Kas Negara, yaitu berupa pajak, pengembalian belanja perjalanan dinas dan belanja pegawai (honor pegawai, TKPK, gaji), jasa giro, penerimaan PNPB, dan lain - lain yang belum disetorkan.

Of national income earned by the Treasurer Expenditure on a budget period, but at the end of the fiscal year has not been remitted to the State Treasury, in the form of tax return on shopping missions and personnel expenditure (salaries of employees, TKPK, salary), current accounts, receipt of non-tax revenues, and other - that has not been deposited.

Pendapatan yang belum disetor ini sebelumnya pada tahun 2014 dicatat sebagai kontra akun Pendapatan yang Ditangguhkan. Khusus untuk Pengembalian Belanja tahun berjalan yang belum disetor, sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

This revenue has not been paid in advance in 2014 is recorded as a contra account Deferred income. Especially for the Return of Expenditure for the current year has not been paid, according treasury director general letter NO. S-2875/PB.6/2016 dated April 5, 2016 explains that Returns Expenditure has not been paid are recognized as a deduction expense in the same period.

- Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya

Debt to Third Parties Other

Utang pihak ketiga yang berada pada Bendahara Pengeluaran yaitu berupa honor, gaji / TKPK, uang makan yang belum dibayarkan kepada pegawai pada tanggal Neraca.

Debt third parties who are in the Spending Treasurer in the form of salaries, salary / TKPK eating money that is owed to employees at the balance sheet date.

Perlakuan Akuntansinya adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di bendahara Pengeluaran, sedangkan di sisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.

The accounting treatment is at hand there Current Assets Cash and Cash Equivalents Others in the treasury expenditures, and on the Liabilities are debts to third parties other.

2. Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Accounting Policies (continued) 2.

d. Aset (lanjutan)

Assets (continued) d.

d1. Aset Lancar (lanjutan)

Current Assets (continued) d1.

- Utang Jangka Pendek Lainnya

Short-Term Debt Other

Pajak yang dipotong oleh bendahara Pengeluaran namun belum disetor ke Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan. Perlakuan Akuntansi adalah di sisi Aset Lancar terdapat Kas Lainnya dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran, sedangkan disisi Kewajiban Jangka Pendek terdapat Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor.

Taxes withheld by the treasurer expenditure but has not been paid to the State Treasury up to the reporting date. Accounting Treatment is on the side there Current Assets Cash and Cash Equivalents at Lainnya Spending Treasurer, while there are side Liabilities Debt Not Paid Taxes Treasurer.

- Belanja Dibayar di Muka (prepaid)

Prepaid Expense

Belanja dibayar dimuka (prepaid) BPK berasal dari realisasi belanja tahun pelaporan, namun barang/ jasa/ fasilitas dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/ dinikmati oleh satuan kerja.

Prepaid derived from spending of the reporting year, but the goods/ services/ facilities has not been fully accepted/ enjoyed by the working unit.

Belanja dibayar dimuka (prepaid) BPK berasal dari realisasi belanja barang untuk sewa gedung/bangunan dengan jangka sewa melebihi tahun pelaporan. Belanjadibayar di muka untuk masa lebih dari satu tahun tidak perlu dipisahkan sebagai akun tersendiri baik yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun maupun lebih dari 1 (satu) tahun seluruhnya dicatat sebagai aset lancar.

Shopping Prepaid (prepaid) BPK is derived from the expenditure items to rent a building / buildings with a lease term exceeds the reporting year. Belanjadibayar in advance for a period of more than one year need not be separated as a separate item either with a maturity of less than 1 (one) year or more than 1 (one) year entirely recorded as a current asset.

Adapun metode perhitungan Belanja Barang Dibayar Dimuka adalah nilai sewa seluruhnya (asumsi 1 tahun = 365 hari) dikalikan dengan umrah sisa hari masa sewa yang masih belum digunakan.

The method of calculation Designer Shopping Prepaid is the rental value entirely (assuming 1 year = 365 days) multiplied by the remainder of the lease term otal that remains largely untapped.

- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembalannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan

Receivables stated in the balance sheet according to the value of the rights arising under telahdikeluarkan decree or dipersamakan billing, which is expected to be accepted pengembalannya within twelve (12) months after the reporting date

Piutang pada BPK berasal dari Piutang Bukan Pajak yang berasal dari Penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca. Akun Piutang Bukan Pajak yang sebelumnya pada saldo per 31 Desember 2014 dicatat sebagai sub akun Piutang PNPB dan Piutang lainnya, untuk Tahun 2015 perlu diidentifikasi apakah masuk dalam kategori Pendapatan Yang Masih Harus Diterima atau Piutang PNPB dengan kebijakan yaitu:

Accounts on BPK derived from the non-tax receivables originating from Penerimaan tax state that has not settled up to the balance sheet date. Accounts Receivable Tax not previously on the balance per December 31, 2014 is recorded as non-tax revenues sub accounts receivables and other receivables, for 2015 needs to be identified whether in the category of income accrued or receivables are non-tax policy, namely:

a) Pendapatan yang masih Harus Diterima adalah pendapatan PNPB yang berdasarkan perhitungan secara akuntansi sudah menjadi hak pemerintah tetapi belum ada hak tagihnya karena belum waktunya untuk dibayar/ditagih dan akun ini baru ada pada Tahun 2015.

Revenues are still Should Accepted PNPB berdasar revenue accounting calculation has become the government's right but there is no right tagihnya because waktunya yet to be paid / invoiced and new account there in 2015.

Kebijakan akuntansi untuk Pendapatan Yang Masih Harus Diterima yaitu :

The accounting policy for revenue accrued as follows:

- Dasar pengakuan adalah perhitungan akuntansi atau tidak melalui penetapan.
- Dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- Tidak dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Basic admission is not through the accounting calculation or determination.

No calculation of the allowance for Doubtful Accounts.

BPK tidak mempunyai akun Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

BPK has no accounts Revenues Still Must be Received.

b) Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Non-tax receivables are receivables from non-tax revenue that has not been paid until the end of the financial period.

Piutang Bukan Pajak pada BPK terdiri atas :

Non-tax receivables on BPK consists of:

a. Piutang PNPB adalah pendapatan PNPB tahun berjalan yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar dan telah timbul hak tagihnya oleh pemerintah (telah jatuh tempo), namun belum diterima pembayarannya.

Non-tax revenue receivable is non-tax revenues of the a. current year that should have been paid by the taxpayer to pay and have raised tagihnya rights by the government (past due), but not yet received payment.

Kebijakan akuntansi untuk Piutang PNPB yaitu :

Accounting policies for receivable PNBS as follows:

- Dasar Pengakuan adalah Surat Tagihan / Surat Penetapan / Yang Dipersamakan.
- Tidak dilakukanya jurnal balik pada awal periode berikutnya.
- Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

Basic admission was STPs / Determination Letter / equivalent.

Not done behind a journal at the beginning of the next period.

Calculation of the allowance for Doubtful Accounts.

Piutang PNPB pada BPK berasal dari Piutang Pendapatan Sewa Rumah Dinas / Rumah Negeri, Pendapatan Sewa Gedung, Bangunan, dan Gudang yang belum dibayar oleh wajib bayar sampai pada tanggal neraca. Kelebihan pembayaran belanja modal karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan (yang dibayar melalui iamanan /

Receivables PNPB the BPK comes from receivables Income Rent Office / Home Affairs, Rent Revenue Building, Building and Warehouse unpaid by the taxpayer to pay up the balance sheet date, excess payment of capital expenditures due to delays in completion of the work (paid through the guarantee / Bank Guarantee).

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2015 and 2014
(Expressed in Rupiah)

2. Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Accounting Policies (continued) 2.

d. Aset (lanjutan)

Assets (continued) d.

d1. Aset Lancar (lanjutan)

Current Assets (continued) d1.

- b. Piutang Lainnya berasal dari piutang yang berasal dari selain piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi misalnya :

Other receivables derived from receivables from other than the non-tax receivables and Current Section Torts Claims Claims example:

- kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggung jawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas, serta

excess expenditure has been accounted for service trips completed in number, but on the balance sheet date have not been resolved by implementing a business trip, as well as

- kelebihan pembayaran gaji / TKPKN kepada pegawai.

overpayment of salary / TKPKN to employees.

Kebijakan akuntansi untuk Piutang Lainnya adalah :

Accounting policy for Other Receivables are:

- Tidak dilakukan jurnal balik pada awal periode berikutnya melainkan saat penyetoran ke Kas Negara

Not done behind a journal at the beginning of the next period, but when the deposit to the State Treasury

Calculation of the allowance for Doubtful Accounts.

- Dilakukan perhitungan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih.

According treasury director general letter NO. S-2875/PB.6/2016 dated April 5, 2016 explains that Returns Expenditure has not been paid are recognized as a deduction expense in the same period.

Sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan No.S-2875/PB.6/2016 tanggal 5 April 2016 menjelaskan bahwa Pengembalian Belanja yang belum disetor diakui sebagai pengurang Beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

- Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.

The bill demands Indemnity (SE) which will be due 12 (twelve) months after the balance sheet date are presented as Current Section TGR bill.

- Persediaan

Inventories

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dalam kondisi baik yang dimasukkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka peayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

Inventories are current assets in the form of goods or equipment in good condition are included to support the operational activities of the government, and goods that are intended to be submitted in order peayanan to the public. Values Inventories are recorded based on the physical count at the balance sheet date multiplied by:

- a) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

the final purchase price, if acquired by purchase; a)

- b) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

if the standard price obtained by producing its own; b)

- c) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya

reasonable price or the estimated sales value if obtained by other means

Sesuai dengan kebijakan akuntansi, beban persediaan hanya diperhitungkan untuk persediaan yang sifatnya umum, tidak termasuk persediaan yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan belanja bantuan sosial.

In accordance with the accounting policy, the burden of inventory accounted only for supplies of a general nature, excluding persediaan derived from spending on goods to be delivered to the community, and social assistance spending.

Untuk persediaan yang bersifat umum, beban persediaan tahun berjalan termasuk didalamnya persediaan yang masih ada digudang dengan kondisi rusak atau usang. Walaupun secara fisik persediaan masih ada tidak diperhitungkan sebagai saldo persediaan. Apabila saldo persediaan akhir yang sebelum opname fisik nilainya lebih besar dari hasil opname fisik maka dicatat sebagai pengurang persediaan

For supplies of a general nature, load supply current year includes inventory that still exist in warehouse with damaged or worn condition. Although physical inventories still not counted as inventory balances. If the ending inventory balance before physical inspections of greater value than the results of physical inspections then recorded as a reduction of inventory

d2. Aset Tetap

Fixed Assets d2.

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap meliputi tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; serta konstruksi dalam pengerjaan. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut :

The fixed assets include all assets used by the government or to the public interest which have a useful life of more than one year. The fixed assets include land; equipment and machines; building and construction; roads, irrigation, and the network; other fixed assets, as well as construction in progress. The value of fixed assets are presented at cost or price wajar. Pengakuan fixed assets based on the unit value of the minimum capitalization as follows:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, yaitu:

In accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 171/PMK.05/2007, the unit value of the minimum capitalization of fixed assets, are as follow:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Expenditures for each unit of equipment and machineries and sport equipment the amount of which is equal to or more than Rp300,000 (three hundred thousand rupiah);

2. Kebijakan Akuntansi (lanjutan)
d. Aset (lanjutan)

Accounting Policies (continued) **2.**
Assets (continued) d.

- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- *Expenditures for building and properties the amount of which is equal to or more than Rp10,000,000 (ten million rupiah); and*
- *Expenditures beyond the minimum limit of capitalization value were treated as expense, except expenditures for land, road/ irrigation/transportation networks and other fixed assets in the form of library collection and artistic items.*

Mengenai kapitalisasi peralatan dan mesin ditetapkan kembali dalam PMK 171/PMK.05/2007, dengan uraian sebagai berikut:

Pengukuran peralatan dan mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang pedoman kapitalisasi dan penilaian BMN. Peralatan dan Mesin yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp300.000 serta yang diperoleh dari pengalihan, dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan mesin dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam daftar BMN dan laporan BMN intrakomptabel. Peralatan dan mesin yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 tetapi nilai satuannya kurang dari Rp300.000 tidak dikapitalisasi. Peralatan dan mesin dengan kategori ini dibukukan di dalam daftar BMN dan laporan BMN Ekstrakomptabel.

The capitalization of equipment and machinery are set back in the PMK 171/PMK.05/2007, with descriptions as follows:

Measurement of equipment and machinery should pay attention to government policies regarding the guidelines for capitalization and valuation of BMN. Equipment and machinery acquired before January 1, 2002, obtained since January 1, 2002 with a minimum unit value greater than or equal to Rp300,000 and obtained from the transfer, are capitalized as fixed assets. Equipment and machinery with this category accounted for and reported in the list and reports BMN intrakomptabel. Equipment and machinery acquired since January 1, 2002 but the unit value of less than Rp300,000 are not capitalized. Equipment and machinery with this category accounted for in the list and report BMN ekstrakomptabel.

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman.

Other fixed assets include fixed assets that can not be grouped into groups Land; Equipment and Engineering; Building and Construction; Roads, Irrigation and Networks, acquired and used for the operations of government and in ready to use. The assets included in the category of Other Fixed Assets is a collection of libraries / book and non-book items patterned art / culture, animals, fish, and plants.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap. Dalam hal Aset Tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi.

Included in the category Other Fixed Assets Fixed Assets Renovation is. Remodeling can be conducted on all belongings in a group of fixed assets. In the case of the fixed assets that meet the capitalization criteria remodeled and does not belong to a work unit, the renovations were recorded as fixed assets renovation.

Akun Aset Tetap Renovasi di BPK terjadi karena 3 hal, yaitu:

Accounts Fixed Assets Renovation in BPK occur because of three things:

1. Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam suatu K/L (BPK). Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker Setjen) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja lain (BPK Perwakilan/Pusdiklat BPK).
2. Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain. Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja K/L lain;
 Pada poin 1) dan 2) apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di Neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

1. Renovation of fixed assets belonging to other work units in a K / L (BPK). Carrying out renovation work units (satker Secretariat) not recorded as additions to fixed assets related to the acquisition value of fixed assets such as ownership exist in other work unit (BPK Representative / Pusdiklat BPK).

2. Renovation of fixed assets belonging to the working unit K / L others. Carrying out renovation work units (satker BPK) did not record it as an addition to the value of acquisition of fixed assets related to the ownership of the fixed assets is on a working unit K / L others;

At points 1) and 2) when the renovation is complete the process before the reporting date, the assets will be recorded as Other Fixed-Fixed Assets Renovation and presented in the balance sheet as fixed assets group. If up to the reporting date the renovations are still in progress, or completed but not yet handed over the process (of a contractor to satker BPK), it will be recorded as Construction In Work (KDP).

3. Renovasi aset tetap milik Instansi pemerintah lainnya (Pemda) dan renovasi aset tetap milik pihak lain selain pemerintah (Swasta, BUMN/BUMD, Yayasan, dan lain-lain). Satuan kerja yang melaksanakan renovasi (Satker BPK) tidak mencatatnya sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

3. Renovation of fixed assets belonging to other government agencies (local government) and the renovation of fixed assets owned by other parties other than the government (private, state / enterprises, foundations, etc.). Who carry out renovation work unit (PIU BPK) did not record it as an addition to the value of acquisition of fixed assets related to the ownership of the fixed assets is on the other side.

2. Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

d. Aset (lanjutan)

Apabila renovasi tersebut telah selesai pengerjaannya sebelum tanggal pelaporan maka akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya - Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut masih dalam proses pengerjaan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahkan (dari kontraktor kepada satker BPK), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Aset tetap (termasuk Aset Tetap Renovasi) yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aktiva tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

d3. Piutang Jangka Panjang

Piutang jangka panjang adalah piutang pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang di BPK hanya berasal dari tagihan Tuntutan Perbendaharaan (TP)/ Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

- TP dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/ daerah. TP dikenakan oleh BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung atau pun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atas kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d4. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain.

- Aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset tak berwujud meliputi *software*, lisensi serta aset tak berwujud lainnya.
- Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam aset tak berwujud. Termasuk dalam akun aset lain-lain adalah aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

e. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Accounting Policies (continued) 2.

Assets (continued) d.

When the renovation is complete the process before the reporting date will be recorded as Other Fixed Assets - Fixed Assets Renovation and presented in the balance sheet as fixed assets group. If up to the reporting date the renovations are still in progress, or completed but not yet handed pengerjaannya (of a contractor to satker BPK), it will be recorded as Construction In Work (KDP).

Fixed assets (including fixed assets renovation) were discontinued from active use government does not meet the definition of fixed assets and assets to be transferred to another post in accordance with the carrying value

Long-term Receivables d3.

Long-term receivables are the government receivables maturing more than 12 months from the reporting date. Long-term receivables in BPK only derived from indemnification claims (TP/TGR).

TP subject to the treasurer for negligent or unlawful act resulting in loss country/ regions. TP imposed by BPK in accordance with the provisions of the legislations.

TGR is a process that is done to public servants not the treasurer in order to demand reimbursement of the losses suffered by the state as a direct or indirect result of an unlawful act committed by the employee for negligence in the performance of its duties.

Other Assets d4.

Other assets is an assets besides current assets, fixed assets and long-term receivables. Included in other assets are intangible assets and other assets.

Intangible assets are assets that can be identified and has no physical form and held for use in producing goods or services or used for other purposes. Intangible assets include software, licenses and other intangible assets.

Other assets are assets that can not be categorized as intangible assets. Included in the other assets is fixed assets which are not used in the operations of government.

Liabilities e.

Liabilities is a debt obligation that arises from past events whose settlement resulting outflows of economic resources of the government.

In the context of the government, obligation arise partly because of the use of loan financing from the public, financial institutions, other government entities, and international agencies. Government liabilities also occur due to engagement with employees who work for the government. Any liability can be imposed by law as a consequences of a binding contract or law and regulation.

2. Kebijakan Akuntansi (lanjutan)
e. Kewajiban

Accounting Policies (continued) 2.
Liabilities e.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Liabilities is a debt obligation that arises from past events whose settlement resulting outflows of economic resources of the government.

Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

In the context of the government, obligation arise partly because of the use of loan financing from the public, financial institutions, other government entities, and international agencies. Government liabilities also occur due to engagement with employees who work for the government. Any liability can be imposed by law as a consequences of a binding contract or law and regulation.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Government liabilities are classified into short-term liabilities and long-term liabilities

- Kewajiban Jangka Pendek

Short-term Liabilities

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

The liabilities are classified as short term liabilities if they are expected to be settled or due within a period of twelve months after the reporting date.

Kewajiban jangka pendek terdiri dari:

Short-term liabilities consist of:

1) Utang kepada Pihak Ketiga

Account Payable - Third Parties 1)

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Kewajiban ini timbul akibat hak atas barang/ jasa telah diterima dan dinikmati dan/ atau perjanjian komitmen telah dilakukan oleh kementerian negara/ lembaga/ pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/ pelunasan/ realisasi atas hak/ perjanjian/ komitmen tersebut.

Third party liabilities are accrued expenses consisted of Employee Expenditures, Goods Expenditures, and Capital Expenditures. These obligations arise from the right over the goods/ services were received and enjoyed, and/ or treaty commitments have been made by national ministries/ agencies/ governments, but until the end of the reporting period have not done the payment/ settlement/ realization of right/ agreements/ commitments.

2) Pendapatan Diterima di Muka

Unearned Revenues 2)

Pendapatan diterima di muka timbul pada saat Pemerintah telah menerima pembayaran atas suatu pemberian jasa/ fasilitas/ pelayanan yang diberikan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Unearned income arising from the government has received payment for the provision of services/ facilities/ services provided, but has not completed the job.

3) Uang Muka dari KPPN

Advance Payment from KPPN 3)

Akun Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Advances Payment from KPPN represents the amount of cash from the Disbursing Treasurer from Money Supply (UP) and Extra Money Supply (TUP) used to pay personnel expenditures, goods expenditures, and capital expenditures.

- Kewajiban Jangka Panjang

Long-term Liabilities

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

The liabilities are classified as long-term liabilities if they are expected to be settled or due within a period of more than twelve months after the reporting date.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Sampai dengan saat ini, BPK RI tidak memiliki kewajiban jangka panjang.

Liabilities are recorded in the amount of nominal value, namely the amount of the government liabilities at the first transaction. The economic flow afterwards such as payment transaction, change of value due to a change in foreign exchange, and other changes, except the changes in market value, are calculated by adjusting the recorded value of the liability. Up to now, BPK RI does not have long-term liabilities.

2. Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Accounting Policies (continued) 2.

f. Ekuitas

Equity f.

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Nilai Ekuitas Awal merupakan Nilai Ekuitas yang berasal dari nilai Ekuitas Akhir tahun yang lalu ditambah dengan nilai Pendapatan yang Ditangguhkan.

Equity is the difference between assets and liabilities in one period. Initial Equity Value Equity is the value derived from the value of the Equity Late last year plus the value of Deferred Revenue.

3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Budget and Realization of Revenues 3.

Anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja TA 2015 adalah sebagai berikut:

Budget and actual revenue and expenditure of the year 2015 are as follows:

NO	Uraian/ Descriptions	2015		
		Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization	%
1.	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Realization of Revenues and Grants	1.805.970.299	14.902.755.670	825,19
	a. <i>Penerimaan Pajak</i> <i>Tax Revenue</i>	1.805.970.299	14.902.755.670	825,19
	b. <i>PNBP</i> <i>Non Tax Revenue</i>			-
	c. <i>Hibah</i> <i>Grant Revenue</i>	-	-	-
2.	Realisasi Belanja Negara Realization Expenditure	3.015.523.798.000	2.795.689.136.028	92,71
	- <i>Belanja Rupiah Murni</i> <i>Domestic</i>	3.015.523.798.000	2.795.689.136.028	92,71
	- <i>Belanja Pinjaman LN</i> <i>Foreign Loans</i>			

a. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/ Sitaan (MAP 42311)

Sale of Production/ Confiscated Goods (MAP 42311) a.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2015, BPK mengestimasi PNPB yang berasal dari penjualan hasil produksi/ sitaan (MAP 42311) sebesar Rp23.625.000. Adapun realisasi pendapatan penjualan hasil produksi/ sitaan (MAP 42311) tahun 2015 adalah sebesar Rp344.839. Realisasi tersebut turun sebesar Rp757.421 atau 68,72% dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp 1.102.260.

According to DIPA for 2015, BPK has estimated the non-tax revenues from sales of production/ confiscated goods (MAP 42311) amounted to Rp23.625.000. The realization of Sale of production/ confiscated goods (MAP 42311) in 2015 amounted Rp344,839. It was decreased by Rp757,421 or 68.72% compared to the realization in 2014 amounted to Rp1,102,260.

b. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN (MAP 42312)

Revenues from the Sale of Assets (MAP 42312) b.

Berdasarkan DIPA tahun 2015, BPK mengestimasi PNPB yang berasal dari pendapatan pemindahtanganan BMN sebesar 192.500.000. Adapun realisasi pendapatan dari pemindahtanganan BMN (MAP 42312) sebesar Rp1.091.840.724. Realisasi tersebut naik sebesar Rp324.195.724 atau sebesar 42,23% dari realisasi tahun 2014 yang sebesar Rp767.645.000.

According to DIPA for 2015, BPK has estimated the non-tax revenues from the sale of assets amounted to Rp192.500.000. The realization of revenues from the sale of asset (MAP 42312) amounted Rp1,091,840,724. The realization was increased by Rp324,195,724 or 42.23% compared to the realization in 2014 amounted to Rp767,645,000.

c. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN (MAP 42314)

Revenues from Lease (MAP 42314) c.

Berdasarkan DIPA tahun 2015, BPK mengestimasi PNPB yang berasal dari pendapatan pemanfaatan BMN (MAP 42314) sebesar 398.795.299. Adapun realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN tahun 2015 adalah sebesar Rp545.827.588. Realisasi tersebut turun sebesar Rp1.245.011.809 atau 69,52% dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp1.790.839.397.

According to DIPA for 2015, BPK estimated the non-tax revenues from lease revenues (MAP 42314) amounted to 398.795.299. The realization of lease revenues in 2015 amounted Rp545,827,588. The realization was decrease by Rp1,245,011,809 or 69.52% compared to the realization in 2014 amounted to Rp1,790,839,397.

d. Pendapatan Jasa I (MAP 42321)

Revenues from Services I (MAP 42321) d.

Berdasarkan DIPA tahun 2015, BPK mengestimasi PNPB yang berasal dari pendapatan jasa I (MAP 42321) sebesar Rp1.191.050.000. Adapun realisasi pendapatan jasa I tahun 2015 adalah sebesar Rp2.892.045.000. Realisasi tersebut turun sebesar Rp1.231.435.000 atau 29,86% dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp4.123.480.000.

According to DIPA for 2015, BPK has estimated the non-tax revenues from services I (MAP 42321) amounted to Rp1.191.050.000. The realization of Revenue Services I in 2015 is Rp2.892.045.000. The realization were decreased by Rp. 1.231.435.000 or 29,86% compared to the realization in 2014 of Rp. 4.123.480.000..

3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan (lanjutan)

e. Pendapatan Jasa II (MAP 42322)

Berdasarkan DIPA tahun 2015, BPK tidak mengestimasi PNPB yang berasal dari pendapatan jasa II (MAP 42322). Adapun realisasi pendapatan jasa II tahun 2015 adalah sebesar Rp1.066.498. Realisasi tersebut turun sebesar Rp69.766 atau 6,14% dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp1.136.264.

f. Pendapatan Jasa Lainnya (42329)

Berdasarkan DIPA tahun 2015, BPK tidak mengestimasi PNPB yang berasal dari pendapatan jasa lainnya (MAP 42329). Adapun realisasi pendapatan jasa lainnya tahun 2015 adalah sebesar Rp 39.214.044. Realisasi tersebut naik sebesar Rp 39.214.044.

g. Pendapatan Denda (MAP 42375)

Berdasarkan DIPA tahun 2015, BPK tidak mengestimasi adanya PNPB yang berasal dari pendapatan denda (MAP 42375). Adapun realisasi pendapatan denda (MAP 42375) tahun 2015 adalah sebesar Rp 80.081.954. Realisasi tersebut turun sebesar Rp593.689.379 atau 88,11% dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp 673.771.333.

h. Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL (MAP 42391)

Berdasarkan DIPA tahun 2015, BPK tidak mengestimasi adanya PNPB yang berasal dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL) (MAP 42391). Adapun realisasi penerimaan kembali TAYL Tahun 2015 adalah sebesar Rp0. Realisasi tersebut turun sebesar Rp12.455.758.973 atau 100,00% dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp12.455.758.973.

i. Pendapatan Pelunasan Piutang (MAP 42392)

Berdasarkan DIPA tahun 2015, tidak mengestimasi adanya PNPB yang berasal dari pelunasan piutang (MAP 42392). Adapun realisasi pendapatan pelunasan piutang tahun 2015 adalah sebesar Rp90.375.416. Realisasi tersebut turun sebesar Rp35.624.584 atau 28,27% dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp126.000.000.

j. Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL (MAP 42395)

Berdasarkan DIPA tahun 2015, tidak mengestimasi adanya PNPB yang berasal dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu (TAYL) (MAP 42395). Adapun realisasi penerimaan kembali TAYL Tahun 2015 adalah sebesar Rp 9.634.545.802. Realisasi tersebut naik sebesar Rp 9.634.545.802 dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp0.

k. Pendapatan Lain-lain (MAP 42399)

Berdasarkan DIPA tahun 2015, BPK RI tidak mengestimasi adanya PNPB yang berasal dari pendapatan lain-lain (MAP 42399). Adapun realisasi pendapatan lain-lain (MAP 42399) tahun 2015 adalah sebesar Rp526.988.805. Realisasi tersebut turun sebesar Rp4.036.803.163 atau 88,45% dibandingkan realisasi tahun 2014 sebesar Rp4.563.791.968.

4. Anggaran dan Realisasi Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/ Lembaga. Belanja BPK meliputi belanja pegawai, barang dan modal. Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

2015			2014		
Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization	%	Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization	%
3.015.523.798.000	2.795.689.136.028	92,71	2.596.280.038.000	2.306.531.652.946	88,84

Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Budget and Realization of Revenues (continued) 3.

Revenues from Services II (MAP 42322) d.

According to DIPA for 2015, BPK did not estimate the non-tax revenues derived from the Revenue Services II (MAP 42322) amounted Rp1.066.498. The realization of Revenue Services II in 2015 is Rp1.066.498,00. The realization were decreased by Rp. 69.766 or 6,14% compared to the realization in 2014 of Rp. 1.136.264.

Others Revenue (MAP 42329) f.

According to DIPA for 2015, BPK did not estimate the non-tax revenues derived from the others revenue (MAP 42329). The realization of the others revenue in 2015 is Rp.39.214.044. The realization were increased by Rp. 39.214.044.

Penalty Revenues I (MAP 42375) g.

According to DIPA for 2015, BPK did not estimate the non-tax revenues derived from the Revenue Fines I (MAP 42375). The realization of Revenue Fines I (MAP 42375) in 2015 amounted Rp. 80.081.954,-. Realization were increased by Rp. 593.689.379 or 88,11% compared to the realization in 2014 of Rp.673.771.333.

Received of last fiscal year revenue (MAP 42391) h.

According to DIPA for 2015, BPK has estimate the non-tax revenues derived from receipts from Last Fiscal Year (TAYL) (MAP 42391). The realization of revenue receipts from last fiscal year 2015 amounted Rp.0. The realization were decreased by Rp. 12.455.758.973 or 100,00% compared to the realization in 2014 of Rp. 12.455.758.973.

Payment of Receivable (MAP 42392) i.

According to DIPA for 2015, BPK did not estimate the non-tax revenues derived from the settlement of receivables (MAP 42392). The realization of the Revenue Settlement of accounts receivable in 2015 amounted Rp35.624.584. The realization were decreased by Rp35.624.584 or 28,27% compared to the realization in 2014 of Rp126.000.000.

Received of last fiscal year revenue (MAP 42395) j.

According to DIPA for 2015, BPK has estimate the non-tax revenues derived from receipts from Last Fiscal Year (TAYL) (MAP 42395). The realization of revenue receipts from last fiscal year 2015 amounted Rp. 9.634.545.802. The realization were increased by Rp. 9.634.545.802 compared to the realization in 2014 of Rp. 0.

Other Revenues (MAP 42399) k.

Based on the DIPA In 2015, BPK RI did not estimate the non-tax revenues from Other Income (MAP 42399). The realization of Other Income (MAP 42399) in 2015 was Rp526.988.805. The realization were decrease by Rp4.036.803.163 or 88,45% compared to the realization in 2014 of Rp4.563.791.968.

Budget and Realization of Expenditures 4.

Expenditures are made by taking into account the principles of economy and efficiency, but still guarantee the implementation of activities as stipulated in the State Ministry/ Institution Work Plan. The expenditures of BPK include personnel expenditures, operating and capital expenditures. The comparison of the expenditure realization in 2015 and 2014 is as follows:

Kode Jenis Belanja/ Expenditures Type Code	Uraian Jenis Belanja/ Description of Expenditures Type	2015	2014	Kenaikan (Penurunan)/ Increase (Decrease)
51	Belanja Pegawai/ Employee Expenditures	991.017.379.999	817.812.034.666	173.205.345.333
52	Belanja Barang/ Goods Expenditures	1.254.647.241.385	1.180.569.700.096	74.077.541.289
53	Belanja Modal/ Capital Expenditures	550.024.514.644	308.149.918.184	241.874.596.460
	Jumlah/ Total	2.795.689.136.028	2.306.531.652.946	489.157.483.082

The comparison of the expenditure realization by type of expenditures in 2015 and 2014 is as follows:

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 Desember 2015 dan 2014
(Disajikan dalam Rupiah)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
December 31, 2015 and 2014
(Expressed in Rupiah)

4. Anggaran dan Realisasi Belanja (lanjutan)

Budget and Realization of Expenditures (continued) 4.

Rincian belanja modal adalah sebagai berikut:

Details of the capital expenditures are as follows:

	31 Desember/ December 31,			
	2015	2014		
1. Tanah	51.681.600.000	31.105.300.000	Land	1.
2. Peralatan dan Mesin	204.825.704.442	130.505.219.524	Equipment and Machinery	2.
3. Gedung dan Bangunan	270.774.457.241	133.327.415.893	Building and Property	3.
4. Fisik Lainnya	22.742.752.961	13.211.982.767	Other Fixed Assets	4.
Jumlah	550.024.514.644	308.149.918.184	Total	

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi belanja berdasarkan sumber pendanaan untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut:

The comparison of the realization of expenditures based on the sources of fund in 2015 is as follows:

No.	Uraian Jenis Belanja/ Description of Expenditure Type	Anggaran/ Budget	Realisasi/ Realization	Sisa Anggaran/ Rest of the Budget
1	Rupiah Murni/ Domestic -Kas	3.015.523.798.000	2.795.689.136.028	219.834.661.972
	- Non Kas	-	-	-
2	PNBP/ Non-Tax State Revenues	-	-	-
3	Hibah/ Grant Revenues	-	-	-
	Jumlah/ Total	3.015.523.798.000	2.795.689.136.028	219.834.661.972

5. Kas di Bendahara Pengeluaran

Cash in Disbursing Treasurers 5.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ December 31,			
	2015	2014		
Sekretariat Jenderal	452.922.393	11.925.803.745	Secretariat General	
BPK Pusat	627.097.908	11.258.712.862	BPK Headquarters	
Jumlah	1.080.020.301	23.184.516.607	Total	

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggung jawabkan atau diserahkan kembali ke kas negara.

Cash in disbursing treasurer represent cash that managed and under the responsibility of disbursing treasurer that come from residual of UP which was not reported and approved yet to KPPN.

6. Kas Lainnya dan Setara Kas

Other Cash and Cash Equivalent 6.

Saldo kas lainnya dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp. 8.016.149.205 dan Rp.6.389.229.629.

Other cash and cash equivalent as of December 31, 2015 and 2014 amounting to Rp. 8.016.149.205 and Rp.6.389.229.629, respectively.

Akun ini menampung kas selain uang muka dari KPPN yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Dari saldo sebesar Rp. 8.016.149.205 tersebut di atas, senilai Rp. 7.473.773.906 merupakan pendapatan negara yang belum disetor ke Kas Negara yang dibukukan ke Pendapatan Yang Ditangguhkan, sedangkan senilai Rp. 299.217.900 merupakan hutang yang belum dibayarkan kepihak ketiga, dan Rp. 243.157.399 merupakan hutang jangka pendek lainnya.

This account accommodate cash besides advances from KPPN that managed by the Disbursing Treasurer. From the balance of Rp. 8.016.149.205 above, amounted to Rp. 7.473.773.906 represents state income that have not been paid to the State Treasury, which were recorded to Deferred Revenue, while the remaining amount Rp. 299.217.900 is others payable have not been paid to a third parties and Rp. 243.157.399 is others short term-payable.

7. Belanja Dibayar di Muka

Prepaid 5.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ December 31,			
	2015	2014		
Sekretariat Jenderal	141.705.007	217.935.589	Secretariat General	
BPK Pusat	-	-	BPK Headquarters	
Jumlah	141.705.007	217.935.589	Total	

Belanja Dibayar di Muka merupakan realisasi belanja tahun laporan, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima / digunakan oleh satuan kerja.

Prepaid expenditure is expenditure in the report, but the goods / services / facilities from third parties has not been entirely accepted / used by the work unit.

8. Piutang Bukan Pajak

Non Tax Receivables 8.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ December 31,			
	2015	2014		
Piutang Bukan Pajak	6.054.726.802	1.347.199.266	Non-Tax Receivables	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(30.273.625)	(6.735.996)	Allowance for Doubtful Accounts	
Jumlah	6.024.453.177	1.340.463.270	Non-Tax Receivables - Net	

Piutang bukan pajak merupakan piutang atas garansi bank, sewa tanah dan rumah dinas serta kelebihan belanja pegawai.

Non-tax receivables represents receivables of a bank guarantee, lease land and home offices as well as excess personnel expenditure.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015 DAN 2014

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014

9. Bagian Lancar TP/ TGR

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31,	
	2015	2014
Bagian Lancar Tagihan TGR	52.046.296	52.046.296
Penyisihan Tagihan TGR	(2.829.630)	(2.829.630)
Jumlah	49.216.666	49.216.666

Saldo tagihan tuntutan ganti rugi (TGR) pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 seluruhnya berasal dari Sekretariat Jenderal.

Saldo bagian lancar TP/TGR tersebut di atas berasal dari piutang TGR pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal karena wanprestasi wajib kerja.

Current Balance of TP/TGR 9.

This account consists of:

Indemnification Claims
 Allowance for Indemnification Claims
Total

Balance of indemnification claims (TGR) on December 31, 2015 and 2014 entirely from the Secretariat-General.

The current portion of TP/ TGR mentioned above comes from the accounts receivable of TGR at the Secretariat General for breach of compulsory labor.

10. Persediaan

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31,	
	2015	2014
Barang Konsumsi	11.971.101.798	12.274.743.956
Bahan untuk Pemeliharaan	761.996.795	794.701.754
Suku Cadang	294.417.848	239.661.366
Pita Cukai, Materai, dan Leges	10.653.400	4.597.000
Barang Persediaan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	616.962.165
Bahan Baku	294.810.020	270.196.390
Persediaan untuk Tujuan Strategis	8.700.000	12.700.000
Persediaan Lainnya	1.897.927.572	1.816.842.577
Jumlah	15.239.607.433	16.030.405.208

Persediaan barang konsumsi merupakan persediaan untuk keperluan operasional seperti alat tulis kantor, kertas, cover, bahan cetak, persediaan penunjang komputer, perabot kantor dan suku cadang kendaraan.

Inventories 10.

This account consists of:

Consumer Goods
 Material for Maintenance
 Spare Parts
 Stamps
 Other Fixed assets for public
 Raw Materials
 Other Supplies for strategic objection
 Other Supplies
Total

Consumer goods inventories are inventories of medicines, and supplies for operational needs such as office supplies, paper, cover, printed materials, computer supporting supplies, office furniture, and vehicle spare parts.

11. Aset Tetap

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2015			
	Saldo Awal/ Beginning Balances	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balances
Harga perolehan				
Tanah	1.623.299.801.062	123.343.507.287	62.744.951.329	1.683.898.357.020
Peralatan dan Mesin	1.381.978.601.359	272.944.350.203	121.069.096.293	1.533.853.855.269
Gedung dan Bangunan	1.992.440.347.363	162.543.027.855	103.633.916.548	2.051.349.458.670
Jalan, Irigasi dan Jaringan	285.956.522.472	13.845.589.132	4.293.720.847	295.508.390.757
Aset Tetap Lainnya	50.641.702.070	83.632.763.701	73.352.850.746	60.921.615.025
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.334.316.974.326	656.309.238.178	365.094.535.763	5.625.531.676.741
Jumlah harga perolehan	5.343.313.195.211	917.860.037.178	445.727.833.473	5.815.445.398.916
Akumulasi Penyusutan				
Peralatan dan Mesin	942.046.819.734	227.889.608.308	56.025.806.611	1.113.910.621.431
Gedung dan Bangunan	162.435.054.309	47.720.567.991	1.380.793.864	208.774.828.436
Jalan, Irigasi dan Jaringan	132.463.315.803	28.000.144.575	334.681.177	160.128.779.201
Aset Tetap Lainnya	260.233.843	52.642.000	-	312.875.843
Jumlah akumulasi penyusutan	1.237.205.423.689	303.662.962.874	57.741.281.652	1.483.127.104.911
Jumlah Nilai Tercatat	4.106.107.771.522			4.332.318.294.003

Fixed Assets 11.

This account consists of:

At cost
 Land
 Equipment and Machinery
 Buildings and Properties
 Road, Irrigation and Transmission Network
 Other Fixed Assets
 Construction in Progress
 Total
 Accumulated Depreciation
 Equipment and Machinery
 Buildings and Properties
 Road, Irrigation and Transmission Network
 Other Fixed Assets
 Total accumulated depreciation
 Total Carrying Amount

	31 Desember/ December 31, 2014			
	Saldo Awal/ Beginning Balances	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balances
Harga perolehan				
Tanah	1.587.450.938.448	244.564.446.814	208.715.584.200	1.623.299.801.062
Peralatan dan Mesin	1.254.750.905.809	202.693.373.352	75.465.677.802	1.381.978.601.359
Gedung dan Bangunan	1.832.863.279.400	281.686.433.521	122.109.365.558	1.992.440.347.363
Jalan, Irigasi dan Jaringan	276.086.520.755	15.366.258.806	5.496.257.089	285.956.522.472
Aset Tetap Lainnya	55.379.615.223	102.310.867.388	107.048.780.541	50.641.702.070
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.006.531.259.635	846.621.379.881	518.835.665.190	5.334.316.974.326
Jumlah harga perolehan	5.057.977.210.786	961.986.118.030	676.650.133.605	5.343.313.195.211

Construction in Progress

Total

11. Aset Tetap (lanjutan)

Fixed Assets (continued) 11.

	31 Desember/ December 31, 2014			
	Saldo Awal/ Beginning Balances	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balances
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation
Peralatan dan Mesin	744.613.658.586	202.867.555.622	5.434.394.474	942.046.819.734
Gedung dan Bangunan	241.649.312.884	33.866.073.534	113.080.332.109	162.435.054.309
Jalan, Irigasi dan Jaringan	97.649.180.141	35.031.644.750	217.509.088	132.463.315.803
Aset Tetap Lainnya	217.023.968	43.209.875	-	260.233.843
Jumlah akumulasi penyusutan	1.084.129.175.579	271.808.483.781	118.732.235.671	1.237.205.423.689
Jumlah Nilai Tercatat	3.973.848.035.207			4.106.107.771.522

Sesuai dengan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat dan KMK Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, maka kebijakan akuntansi aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2005 berubah, dari yang semula dilakukan penyusutan sejak tanggal perolehan menjadi dilakukan sejak semester II tahun 2010.

In accordance with PMK No. 90 / PMK.06 / 2014 regarding Amendment of PMK No. 1 / PMK.06 / 2013 regarding Depreciation of State-owned Assets in the form of Fixed Assets in Central Government Entity and KMK No. 145 / KM.6 / 2014 regarding Amendment of KMK No. 94 / KM.6 / 2013 regarding Modul of State-owned Assets Depreciation in the form of Fixed Assets in Central Government Entity, the accounting policies of fixed assets acquired before 2005 changed from that previously performed the depreciation since the acquisition date become performed since the second semester of 2010.

12. Piutang Jangka Panjang

Other Assets 12.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ December 31,		
	2015	2014	
Tagihan TGR	2.566.962.548	2.316.696.744	Indemnification Claims
Penyisihan Tagihan TGR	(2.566.962.548)	(2.316.696.744)	Allowance for Indemnification Claims
Jumlah	-	-	Total

Saldo tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 seluruhnya berasal dari Sekretariat Jenderal.

Balance of indemnification claims (TGR) on December 31, 2015 and 2014 entirely from the Secretariat-General.

Perubahan penyisihan tagihan TGR adalah sebagai berikut:

Changes in allowance of indemnification claims (TGR) are as follows:

	31 Desember/ December 31,		
	2015	2014	
Saldo awal	2.316.696.744	2.270.337.544	Beginning balance
Penyisihan tagihan TGR selama tahun berjalan	194.468.008	125.000.000	Allowance for indemnification claims during the year
Pembalikan penyisihan tagihan TGR	(194.468.008)	(126.000.000)	Reversal of the allowance for indemnification claims
Reklasifikasi	-	1.000.000	Reclassification
Penyesuaian kurs	250.265.804	46.359.200	Foreign exchange rate adjustment
	2.566.962.548	2.316.696.744	

13. Aset Lainnya

Other Assets 13.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ December 31,		
	2015	2014	
Aset Tidak Berwujud	123.212.943.984	102.622.959.523	Intangible Assets
Aset Lain-lain	29.421.987.171	12.759.055.169	Other Assets
Akumulasi Penyusutan	(26.788.670.985)	(10.113.261.623)	Accumulated Depreciation
Jumlah	125.846.260.170	105.268.753.069	Total

Aset lain-lain merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan.

Other assets are Fixed Assets not used in operations administration.

Mulai tahun 2013 dilakukan penerapan penyusutan atas aset lain-lain sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintahan Pusat.

Start in 2013, BPK RI has made the application of the depreciation of other assets in accordance with the Regulation of Minister of Finance No. 1/PMK.06/2013 on State Assets Depreciation of Fixed Assets in the form of Central Government Entities.

14. Kewajiban Jangka Pendek

Akun ini terdiri dari:

Short Term- Liabilities 14.

This account consists of:

	31 Desember/ December 31,	
	2015	2014
Utang Kepada Pihak Ketiga	55.829.471.140	49.243.939.185
Pendapatan diterima dimuka	1.228.579.505	1.330.883.422
Uang Muka dari KPPN	1.080.020.301	23.184.516.607
Utang Jangka Pendek Lainnya	243.157.399	94.761.400
Jumlah	58.381.228.345	73.854.100.614

Account Payable - Third Parties
Unearned Revenue
Advance Payment from KPPN
Others short term-Liabilities
Total

a. Utang kepada Pihak Ketiga

Account Payable - Third Parties a.

Utang kepada pihak ketiga berdasarkan Satuan Kerja (Satker) adalah sebagai berikut :

Account payable - third parties based on working unit are as follows :

	31 Desember/ December 31,	
	2015	2014
Sekretariat Jenderal	55.774.626.240	49.111.369.625
BPK Pusat	54.844.900	132.569.560
Jumlah	55.829.471.140	49.243.939.185

Secretariat General
BPK Headquarters
Total

b. Pendapatan Diterima Dimuka

Unearned Revenues b.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2015 terdiri dari:

The balances of Unearned Revenues are as follows:

	31 Desember/ December 31,	
	2015	2014
Sekretariat Jenderal	1.228.579.505	1.330.883.422
BPK Pusat	-	-
Jumlah	1.228.579.505	1.330.883.422

Secretariat General
BPK Headquarters
Total

Akun pendapatan sewa diterima di muka timbul pada saat BPK RI telah menerima pembayaran atas suatu pemberian jasa/fasilitas/pelayanan yang diberikan oleh pihak ketiga dan pembayaran sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara. Pada posisi 31 Desember 2015 masih terdapat barang/jasa/fasilitas dari BPK RI yang belum dinikmati pihak ketiga.

Advance Revenues Accounts are from payment that has been received by BPK RI for the provision of services / facilities / services provided by third parties and payment is deposited into the Central Government Cash Account . On December 31, 2015 there is still goods/ services/ facilities of BPK RI that not been used by the third party.

c. Uang Muka dari KPPN

Advance Payment from KPPN c.

Saldo uang muka dari KPPN pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp 1.080.020.301,00 dan Rp 23.184.516.607,00.

Advances Payment from KPPN Balance as of December 31, 2015 and 2014 amounted Rp 1.080.020.301,00 and Rp 23.184.516.607,00.

d. Utang Jangka Pendek Lainnya

Others Short Term-Liabilities d.

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp 243.157.399,00 dan Rp 94.761.400,00.

Other Short Term -Liabilities Balance as of December 31, 2015 and 2014 amounted Rp 243.157.399,00 and Rp 94.761.400,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya Merupakan potongan pajak yang dipotong Bendahara Pengeluaran dan belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2015

Other Short Term-Liabilities Represents tax deductions withheld Spending Treasurer and has not been paid to the State Treasury per December 31, 2015 balance of Deferred Revenue represents income countries that have not paid into the State Treasury of funds available in the Treasurer and presented as Cash Expenditures Other and Cash Equivalents.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015 DAN 2014

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014

15. Ekuitas

Current Equity 15.

Saldo ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp 4.430.345.080.757,00 dan Rp 4.184.734.190.946,00.

Current Equity Balance as of December 31, 2015 and 2014 amounted Rp 4.430.345.080.757,00 and Rp 4.184.734.190.946,00.

Saldo Pendapatan yang ditangguhkan per 31 Desember 2014 sebesar Rp. 4.133.165.469,00 dikonversi masuk ke ekuitas

Deferred Revenues Balance as of December 31, 2014 amounted Rp 4.133.165.469,00 converted into the current equity

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Equity is the net assets of the entity which is the difference between assets and liabilities. An Equity are presented in the Statement of Changes in Equity

	31 Desember/ December 31,	
	2015	2014
Ekuitas Awal	4.184.734.190.946	4.184.734.190.946
Surplus/Defisit LO	(2.547.383.570.243)	-
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan	381.538.847	-
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(15.180.389.541)	-
Transaksi Antara Entitas	2.807.782.707.608	-
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	245.600.286.671	-
Ekuitas Akhir	4.430.334.477.617	4.184.734.190.946

Beginning Balance of Equity
Surplus/Deficit LO
Adjustment of the value of the current year year
Cumulative Impact Policy Changes /
Fundamental Errors
Entitas Transactions
Increase/Decrease Equity
Ending Balances of Equity

16. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Akun ini terdiri dari:

Non-Tax State Revenue 16.
This account consists of:

	31 Desember/ December 31,	
	2015	2014
Pendapatan Negara Bukan Pajak	9.125.769.609	-
Jumlah	9.125.769.609	-

Non-Tax state Revenue
Total

17. Beban Pegawai

Akun ini terdiri dari:

Employee Expense 17.
This account consists of:

	31 Desember/ December 31,	
	2015	2014
Beban Gaji	249.449.699.302	-
Beban Tunjangan-tunjangan	104.209.019.699	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-
Beban Lembur	5.188.630.550	-
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai	639.619.110.152	-
Transit	-	-
Jumlah	998.466.459.703	-

Salaries Expense
Allowances Expense
Honorarium and vakasi Expense
Overtime Expense
Special benefit expenses and
personnel expenses transit
Total

18. Beban Persediaan

Akun ini terdiri dari:

Supply Expense 18.
This account consists of:

	31 Desember/ December 31,	
	2015	2014
Beban Persediaan Konsumsi	45.334.446.137	-
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan leges	56.924.500	-
Beban Persediaan Bahan Baku	3.620.834.236	-
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	104.000.000	-
Beban Persediaan Lainnya	4.472.505.131	-
Jumlah	53.588.710.004	-

Consumption Supply Expense
Duty, Stamps and Certification Fee Expense
Raw Material Expense
Provision for strategic objectives / guard Expense
Other Supply Expense
Total

19. Beban Barang dan Jasa

Akun ini terdiri dari:

Goods and Services Expense 19.
This account consists of:

	31 Desember/ December 31,	
	2015	2014
Beban Barang Operasional	128.207.073.944	-
Beban barang Non Operasional	185.809.104.456	-
Beban Kontribusi	-	-
Beban Langganan Daya dan Jasa	53.249.972.395	-
Beban Jasa Pos dan Giro	33.036.550	-
Beban Jasa Konsultan	1.617.978.560	-
Beban Jasa Profesi	18.957.159.367	-
Beban Sewa	12.684.664.294	-
Beban Barang	-	-
Beban Jasa Lainnya	44.183.140.124	-
Sub Total	444.742.129.690	-

Operational goods Expense
Non Operational goods Expense
Contribution Expense
Power subscriptions services Expense
Postal and giro services Expenses
Consultant Services Expense
Professional services Expense
Rent Expense
Luggage Expense
Other services Expense
Sub Total

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2015 DAN 2014

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2015 AND 2014

19. Beban Barang dan Jasa (lanjutan)

Goods and Services Expense (continued) 19.

	31 Desember/ December 31,	
	2015	2014
Akun ini terdiri dari:		
Beban Aset Ekstrakompatabel Peralatan dan Mesin	71.771.800	-
Beban Aset Ekstrakompatabel Gedung dan Bangunan	4.950.000	-
Beban Aset Ekstrakompatabel Aset Tetap Lainnya	-	-
Sub Total	76.721.800	-
Jumlah	444.818.851.490	-

This account consists of:

Ekstracomptable Assets of Equipment and Machinery Expense
Ekstracomptable Assets of building and properties Expense
Ekstracomptable Assets of other Assets Expense
Sub Total
Total

20. Beban Pemeliharaan

Maintenance Expenses 20.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ December 31,	
	2015	2014
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.778.096.442	-
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5.229.502.316	-
Beban pemeliharaan Peralatan dan Mesin	24.968.852.565	-
Beban Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non	46.546.000	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.681.125.453	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	630.351.235	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	397.578.375	-
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	5.723.796.912	-
Beban Persediaan suku cadang	1.283.684.824	-
Jumlah	90.739.534.122	-

Building and properties Maintenance Expenses
Other building and properties Maintenance Expenses
Equipment and machinery Maintenance Expenses
Fuel and Lubricants and Special Non-Lubricants Expenses
Other Equipment and machinery Maintenance Expenses

Network Maintenance Expenses
Other Maintenance Expenses
Raw material Inventory Expenses
Spare parts Inventory Expenses
Total

21. Beban Perjalanan Dinas

Official Travel Expenses 21.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ December 31,	
	2015	2014
Beban Perjalanan Biasa	538.887.826.547	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	32.858.153.443	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	56.907.105.493	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	19.551.878.384	-
Beban Perjalanan Biasa- Luar Negeri	36.876.454.173	-
Jumlah	685.081.418.040	-

Common Travel Expenses
Official Travel in Town Expenses
Official Travel Meeting Package in Town Expenses
Official Travel Meeting Package out Town Expenses
Overseas Common Travel Expenses
Total

22. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Depreciations and Amortizations Expenses 22.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ December 31,	
	2015	2014
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	209.578.897.762	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	46.345.298.565	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	27.365.571.345	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	52.642.000	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	228.849.916	-
Jumlah	283.571.259.588	-

Equipment and machinery Depreciation Expenses
Building and properties Depreciation Expenses
Road, irrigation and network Depreciation Expenses
Other assets Depreciation Expenses
Unused assets in operation Depreciation Expenses
Total

23. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Allowance for Bad Debt Expenses 23.

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	31 Desember/ December 31,	
	2015	2014
Beban Penyisihan Piutang PNB	27.032.517	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	2.422.257	-
Beban Penyisihan Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	250.265.804	-
Jumlah	279.720.578	-

Allowance for PNB Receivables Expenses
Allowance for Other Receivables Expenses
Allowance for Indemnification Claim Expenses
Total

24. Kegiatan Non Operasional

Akun ini terdiri dari:

Non Operation Activities 24.

This account consists of:

	31 Desember/ December 31,		
	2015	2014	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(5.552.779.802)	-	Surplus/Deficit Disposal of noncurrent Assets
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	1.091.840.724	-	Gain on Disposal of noncurrent Assets
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	6.644.620.526	-	Loss on Disposal of noncurrent Assets
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	Surplus/Deficit of payment of Longterm liabilities
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	Gain on payment of Longterm liabilities
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	Loss of payment of Longterm liabilities
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.589.393.475	-	Surplus/Deficit of Other non operation activities
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.594.674.441	-	Gain on Other non operation activities
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.280.966	-	Loss on Other non operation activities
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	36.613.673	-	Surplus/Deficit from Other Non operation

25. Informasi Penting Lainnya

Other Significant Informations 25.

a. Australian Agency International Development (AusAID)

Australian Agency International Development (AusAID)

a.

Hibah AusAID-GPF 2 dengan Nomor Register 71012601 dan nomor PPHLN Grant Agreement ROU 38710 yang ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2010, mulai efektif (tentatif) sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 30 Desember 2014 dengan alokasi komitmen hibah sebesar AUD799.878.

AusAID grant-GPF 2 with Register No. 71012601 and No. 38710 ROU NPPHLN Grant Agreement signed on August 2, 2010 became effective (tentative) from January 1, 2012 until December 30, 2014 with the allocation of a grant commitment of AUD799.878.

Hibah dalam bentuk technical assistance tersebut memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas auditor BPK RI dalam melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan keuangan.

The grant is in the form of technical assistance has the primary objective to increase the capability and capacity of the BPK RI auditors in conducting performance audit and financial audit.

Selama Tahun 2014 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yaitu :

During 2014, the activities are as follows:

- 1) Satu orang Deployment Senior Officer ANAO di BPK RI sebagai Subject Matter Expert (SME) bidang pemeriksaan Kinerja;
- 2) Partisipasi delegasi BPK RI dalam ACAG and ACPAC Conference di Sydney Australia;
- 3) Kunjungan delegasi ANAO sebanyak dua kali, masing-masing ke BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara dalam rangka workshop pemeriksaan kinerja (bersama SME);
- 4) Kunjungan Delegasi BPK RI ke ANAO dalam rangka Pengembangan Kertas Kerja Elektronik, Audit TI, Pemeriksaan Laporan Keuangan Berbasis Akrua, dan QA sebanyak satu kali;
- 5) Kunjungan dua orang delegasi ANAO ke Jakarta untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman bidang QA pemeriksaan keuangan, atas pilot project QA di Perwakilan Sumatera Selatan dan D.I Yogyakarta sebanyak satu kali;
- 6) Teleconference DFAT dengan biro Humas dan Luar Negeri BPK RI dalam rangka Monitoring & Evaluation implementasi GPF di BPK RI pada 2012 sebanyak satu kali;
- 7) Wawancara dengan tim independen dan presentasi hasil review dalam rangka Mid-term Review Program GPF II DFAT;
- 8) Secondment tenaga Ahli BAKN ke JCPAA Australia sebanyak satu kali

- 1) One of Senior Deployment Officer ANAO in BPK RI as a Subject Matter Expert (SME) Performance Audit
- 2) Participation of BPK RI delegation's in the ACAG and ACPAC Conference in Sydney, Australia
- 3) ANAO delegation visits twice, on BPK RI Representative Office of Central Borneo and North Sumatra in order to Performance Audit Workshop (with SME);
- 4) BPK RI delegation visits to ANAO in order to Electronic Working Paper Development, IT Audit, Auditing for Accrual Based Financial Statements, and QA, as many as one time;
- 5) Visits of two ANAO delegations in Jakarta to discuss and sharing experiences on QA audits, above QA pilot project in BPK RI Representatives Office in South Sumatra and DI Yogyakarta, as many as one-time;
- 6) DFAT teleconference with Public Relations and Foreign Affairs Bureau of BPK RI in the framework of Monitoring & Evaluation the implementation GPF in BPK RI in 2012 as many as one-time;
- 7) Interview with an independent team and the presentation of the results of the review in order to Mid-term Review of the GPF II Program DFAT;
- 8) Experts Secondment BAKN to JCPAA Australia, as many as one-time;

Kegiatan-kegiatan tersebut belum disahkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) pada Kementerian Keuangan karena belum diserahterimakan oleh AusAID kepada BPK RI secara administratif dalam bentuk BAST dan akan di BAST kan serta disahkan pada tahun anggaran berikutnya.

The above activities have not been approved by the Directorate General of Debt Management (DJPU) in the Ministry of Finance, because it has not been handed over by AusAID to BPK RI administratively in the form of Certificate of Acceptance (BAST), and will be done in the next financial year.

b. United State Agency International Development (USAID)

Pada tahun 2015 telah dilakukan serah terima atas hibah berbentuk Jasa dari Amerika Serikat melalui *United States Agency for International Development (USAID)* sebesar USD 2,117,359 atau setara Rp 26.996.327.250,00 melalui BAST No. 01/USAID-INA/BAST/2015 tanggal 16 April 2015.

Kegiatan yang diserahkan merupakan kegiatan dari tahun 2013 yang merupakan bagian dari hibah dengan Nomor Register 71158801 dan telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Nomor 0162/PR.8/2015.

Sesuai dengan Surat dari Dirjen Perbendaharaan No. S-9678/PB/2015 tanggal 16 November 2015, pada saat penerimaan jasa dari donor disertai BAST, setker melakukan perekaman pada aplikasi SAIBA sesuai tanggal BAST yaitu 16 April 2015.

c. Kegiatan Hibah Dari Pihak Departmen Of Foreign Affairs And Trade (DFAT) Yang Belum Dilakukan Serah Terima

Terdapat beberapa kegiatan pada Tahun 2015 yang belum dilakukan serah terima dari pihak *DFAT* Australia dalam mekanisme hibah dengan nomor register 710012601 berupa :

1. Jasa satu orang *Deployment Senior Officer ANAO* di BPK RI sebagai *Subject Matter Expert (SME)* bidang Pemeriksaan Kinerja (sampai April 2015)

2. Kunjungan pimpinan BPK ke Australia dalam rangka *ACPAC Meeting* pada 16-17 April 2015

3. Kunjungan belajar ke ANAO, 25-29 Mei 2015, untuk mempelajari metode penulisan pelaporan pemeriksaan yang mudah dimengerti, efektif dan berguna bagi pemangku kepentingan.

4. Kunjungan ANAO ke BPK untuk membahas tindak lanjut *Deployment*, rencana workshop dan monitoring dan evaluasi oleh BPK, ANAO dan Kementerian Luar Negeri Australia (*DFAT*) di Jakarta, 29 Juni - 1 Juli 2015.

5. *Workshop* Pemeriksaan LKPD berbasis akrual bekerja sama dengan ANAO/AO NSW untuk para Kepala Perwakilan BPK se - Indonesia selama dua gelombang, Gelombang I pada 3-4 Agustus 2015 dan Gelombang II pada 6-7 Agustus 2015.

6. Kunjungan empat orang senior auditor ke ANAO dan AO NSW untuk mempelajari pemeriksaan laporan keuangan berbasis akrual di Australia pada tanggal 31 Oktober sampai 14 November 2015.

7. Secondment dua orang senior auditor dengan topik pemeriksaan kinerja di ANAO pada tanggal 10 Oktober - 19 Desember 2015.

8. *High Level Visit Deputy Auditor General ANAO* ke BPK pada tanggal 23-24 November 2015. Pada kunjungan tersebut, selain dilaksanakan diskusi dengan Badan juga dilaksanakan workshop mengenai manfaat akuntansi akrual yang mengundang Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan sebagai regulator, serta entitas yang diperiksa.

9. Kunjungan delegasi ANAO/AO NSW dalam rangka asistensi perencanaan pemeriksaan LKPD akrual ke Perwakilan Jawa Tengah dan Kalimantan Barat pada tanggal 1-10 Desember 2015.

10. Kegiatan persiapan deployee baru untuk BPK di ANAO.

d. Kegiatan Hibah Dari Pihak Strengthening Integrity And Accountability (SIAP) 1 USAID Yang Belum Dilakukan Serah Terima

Terdapat beberapa kegiatan pada tahun 2015 yang belum dilakukan serah terima dari pihak Strengthening Integrity and Accountability (SIAP) 1 USAID dalam mekanisme hibah dengan nomor register 71158801 berupa :

1 *Screening BPK Short Movies* di Papua (Februari 2015)

2 *Professional Certification: Certified Government Auditing Professional (CGAP)*; 17 participants.

3 *Facilitate 2 BPK Participants in GAO International Fellowship Program* (March - July 2015).

United State Agency International Development (USAID)

In 2015 has been carried out on the grant-shaped handover Service of the United States through the United States Agency for International Development (USAID) amounting to USD 2,117,359 or equivalent to Rp 26,996,327,250.00 through BAST No. 01 / USAID-INA / BAST / 2015 dated April 16, 2015.

Activities that handed the activities of the year 2013 which is part of the grant to the Register Number 71,158,801 and has been endorsed by the Directorate General of Financing and Risk Management No. 0162 / PR.8 / 2015.

In accordance with the letter of the Director General of Treasury No. S-9678 / NT / 2015 dated 16 November 2015, upon receipt of services from the donor accompanied by BAST, setker recording on the date of application Saiba BAST ie 16 April 2015.

Activity Grants From The Department Of Foreign Affairs And Trade (DFAT) What Not to Do Handover

There are a number of activities in 2015 that have not performed the handover of the Australian DFAT in grant mechanism with the register number 710 012 601 in the form of :

1. Deployment Services Senior Officer of the ANAO in BPK RI as a Subject Matter Expert (SME) field of Performance Examination (until April 2015)

2. Visit the BPK leadership to Australia in order ACPAC Meeting 16-17 April 2015

3. Visits to learn to ANAO , 25-29 May 2015 , to study the methods of inspection reporting writing easily understandable , effective and useful to stakeholders .

4. Visits ANAO to BPK to discuss the follow up Deployment , plan workshops and monitoring and evaluation by BPK , ANAO and the Australian Ministry of Foreign Affairs (DFAT) in Jakarta , June 29-July 1 , 2015.

5. Examination Workshop LKPD accrual cooperate with ANAO / AO NSW for the Chief Representative of the BPK se - Indonesia for two waves , the first wave on 3-4 August 2015 and Wave II 6-7 August 2015 .

6. The visit of four senior auditor to ANAO and AO NSW to study the examination of accrual-based financial statements in Australia on October 31 to November 14 , 2015.

7. seconded two senior auditors with the topic in ANAO performance audit on October 10 to December 19, 2015.

8. High Level Visit of Deputy Auditor General ANAO to CPC on November 23 to 24 , 2015. During that visit , in addition , discussions with the Agency also conducted a workshop on the benefits of accrual accounting that mengundnag Ministry of Finance and the Ministry of Commerce as a regulator , as well as the audited entity .

9. The visit by a delegation ANAO / AO NSW in order LKPD inspection planning assistance to Representatives accrual Central Java and West Kalimantan on December 1 to 10 , 2015.

10. Preparatory activities for the BPK in the new deployee ANAO .

Activity Grants From The Strengthening Integrity And Accountability (SIAP d. 1 USAID What Not to Do Handover

There are several events in 2015 that have not performed the handover of the Strengthening Integrity and Accountability (SIAP) 1 USAID grant mechanism with the register number 71,158,801 in the form of :

1 Screening BPK Short Movies in Papua (February 2015)

2 Professional Certification : Certified Government Auditing Professional (CGAP) ; 17 of participants .

3 Facilitate 2 BPK Participants in GAO's International Fellowship Program (March - July 2015) .

d. Kegiatan Hibah Dari Pihak Strengthening Integrity And Accountability (SIAP) **Activity Grants From The Strengthening Integrity And Accountability (SIAP)**
1 USAID Yang Belum Dilakukan Serah Terima (lanjutan) **1 USAID That Not Submitted (continued)**

4	<i>Technical Assistant on Strategic Issues in Semi-annual Audit Reporting (IHPS) (April 2015); 38 participants.</i>	<i>Technical Assistant on Strategic Issues in Semi-annual Audit Reporting (IHPS) (April 2015); 38 participants.</i>	4
5	<i>BPK Board Members Exchange Visit (May 2015)</i>	<i>BPK Board Members Exchange Visit (May 2015)</i>	5
6	<i>Strengthening measure to support anti-fraud efforts at BPK (Fraud Risk Assessment).</i>	<i>Strengthening measure to support anti-fraud efforts at BPK (Fraud Risk Assessment).</i>	6
7	<i>The development of BPK E-learning system.</i>	<i>The development of BPK E-learning system.</i>	7
8	<i>Professional Certification: Certified Fraud Examiner (October 2015)</i>	<i>Professional Certification: Certified Fraud Examiner (October 2015)</i>	8
9	<i>One-day Seminar on GAO-BPK Approach to Performance Auditing; 100 participants.</i>	<i>One-day Seminar on GAO-BPK Approach to Performance Auditing; 100 participants.</i>	9
10	<i>Training on GAO Approach to Performance Auditing; 16 participants.</i>	<i>Training on GAO Approach to Performance Auditing; 16 participants.</i>	10

Kegiatan kegiatan tersebut belum disahkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) pada kementerian Keuangan karena belum diserahterimakan oleh USAID kepada BPK RI secara administratif dalam bentuk BAST dan akan di BAST kan serta disahkan pada tahun anggaran berikutnya.

The above activities have not been approved by the Directorate General of Debt Management (DJPU) in the Ministry of Finance, because it has not been handed over by USAID to BPK RI administratively in the form of Certificate of Acceptance (BAST) and will be done in the next financial year.

26. Penyelesaian Laporan Keuangan

Completion of Financial Statements 26.

Manajemen BPK RI bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang telah diselesaikan pada tanggal 26 Mei 2016.

The Management of BPK RI is responsible for the preparation of the financial statements that were completed on May 26, 2016.